

# MEMBANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT



Diryo Suparto, S.Sos., M.Si.

# **Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat**

**Copyright © 2020 – Diryo**

Penulis : Diryo Suparto, S.Sos., M.Si.  
Editor : Sixteen  
Cover : AbizuraZainal  
Penata Letak : Zauji Sofi

CP. UM029-2020

**ISBN : 978-623-7438-97-7**

Cetakan kedua, Juli 2021

Diterbitkan oleh:

**CV CENDEKIA PRESS**

NIB : 8120107982776

Komp. GBA Barat Blok C-4 No. 7 Bandung

Email : penerbitbuku720@gmail.com

Website : [www.penerbitbuku.id](http://www.penerbitbuku.id)

## **Anggota IKAPI**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.



## PRA KATA

Proses PILKADA, PILEG, PILPRES seringkali meninggalkan catatan hitam, khususnya dalam perihal keamanan dan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Demokrasi dan masyarakat sipil seperti dua sisi mata uang, keduanya hidup berdampingan. Dengan masyarakat sipil yang kuat, demokrasi akan berjalan dengan baik (Putnam, 1993). Dalam suasana negara demokrasi, masyarakat sipil juga akan tumbuh dan berkembang. Nurcholis Madjid (1999) membuat analogi yang sangat menarik bahwa masyarakat sipil adalah "rumah" demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya diwujudkan dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis, tetapi juga pembibitan di "rumah", yaitu masyarakat sipil.

Asosiasi independen dan media bebas memberikan dasar untuk membatasi kekuasaan negara melalui kontrol publik. Keberagaman dan pluralisme masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya, jika diatur dan dikelola dengan baik, dapat menjadi landasan penting bagi persaingan demokrasi.

Dalam pelaksanaan Pemilu, sering kali kita dihadapkan pada kendala yang masih mengakar, mulai dari rendahnya pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan agregasi serta penerjemahan tentang makna politik, serta kebingungan cara melakukan partisipasi melalui prosedur dan cara berpolitik yang legal, konstitusional serta

bermoral. Keadaan semacam ini tentu bisa diartikan sebagai proses permulaan dari dekratisasi. Sebagus apa pun sistem perpolitikan yang dibangun, semua akan sia-sia jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran politik, karena merekalah sejatinya pelaku demokrasi.

Buku ini mengupas tuntas tentang kondisi demokrasi di negeri ini, serta kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi juga disajikan dengan bahasa yang ringan namun tetap berisi.

*“Tiada gading yang tak retak”*, tulisan ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran perbaikan dari pembaca yang budiman menjadi penting untuk penyempurnaannya.

Selamat membaca...

Salam Rakyat

Penulis

## DAFTAR ISI

PRA KATA	lii
DAFTAR ISI	V
PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA	1
Perkembangan Demokrasi	3
Demokrasi Indonesia	6
PARTISIPASI POLITIK	9
Tipologi Partisipasi Politik	18
PARTAI POLITIK	33
KORELASI PERS, NEGARA, PASAR DAN CIVIL SOCIETY	45
Media Politik dan Kekuasaan	48
FRAMING, FRAME AGENDA SETTING MEDIA MASSA	65
Framing dalam Paradigma Konstruktif	73
Agenda Setting Media	81
DINAMIKA POLITIK LOKAL	89
Kinerja Penyelenggara Pemilu	95
DAFTAR PUSTAKA	99
TENTANG PENULIS	101



# PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

*“Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi”*

*- Robert F. Kennedy-*

## **MAKNA DEMOKRASI**

Pembahasan tentang demokrasi di negeri kita memang tidak ada habisnya. Selalu ada ruang untuk kita buka dan diskusikan, karena terlalu banyak problematika di dalamnya. Selesai masalah satu, muncul masalah lainnya. Beres satu isu, kembali sumbur berbagai isu-isu lain berkaitan demokrasi di negeri ini.

Kata “demokrasi” tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata yang sering diucapkan banyak orang dalam pidato dan orasinya, namun apakah semua orang yang mengucapkan paham akan maknanya? Demokrasi lahir dari bahasa Yunani Kuno (Athena Kuno) pada abad ke-5 Sebelum Masehi. Dari kata

*demos* (rakyat) serta *kratos/cratein* (pemerintahan). Jika kita maknai secara bebas bisa berarti pemerintahan dari rakyat, atau pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi merupakan bagian penting dalam ilmu politik, karena di era saat ini demokrasi menjadi indikator kemajuan politik suatu negeri.

Demokrasi merupakan sistem dengan orientasi utama adalah masyarakat. Tidak seperti model otoritarianisme dengan ideologi negara saja sudah bisa berjalan mulus, tentu tidak sama dengan demokrasi, dukungan masyarakat menjadi penopang utama supaya kenegaraan bisa berjalan sesuai tujuan. Namun demokrasi yang hanya dikuasai oleh beberapa orang elit maka menandakan sistem “otoritarianisme baru”, hanya saja meminjam istilah demokrasi.

Demokrasi juga bisa diartikan sebagai wujud dari prosedur yang ada dalam pemerintahan suatu negara dengan tujuan bisa menciptakan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dalam negara tersebut.

**Suatu negara dapat dikatakan negara demokratis apabila di negara tersebut ada cara-cara yang dilakukan dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik dalam menjalankan hak hak asasi manusia serta memberi hak penuh pada rakyat, baik secara personal ataupun kelompok untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada.** Sedangkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi memiliki beberapa ciri serta karakter sebagai berikut : Semua langkah yang diambil (kebijakan) melibatkan masyarakat dalam pemerintahan (partisipasi), peduli pada aspirasi masyarakat



bawah (respon), menjunjung tinggi hukum (*law enforcement*) serta mengedepankan semua aturan hukum (*rule of law*), tidak tertutup, berdasarkan konsensus, bertanggungjawab, efisien, efektif, stabil, bersih (*check and balance*), serta adanya proses yang terbuka (Saiful Mujani, 2001). Oleh karena itu, kepedulian masyarakat sangat berpengaruh terciptanya negara demokratis. Ada keikutsertaan rakyat untuk selalu peduli dan melihat bagaimana kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa. Energi pancaran politik menyelimuti masyarakat serta masuk dalam sendi politik nasional adalah hasil pertempuran di masyarakat.

Tentunya wujud demokrasi tidak bisa juga langsung diberlakukan secara kaku serta “dogmatis”, tanpa mempedulikan kondisi masyarakatnya. Jika diperkirakan ada sesuatu yang bisa menyebabkan adanya ketidaknyamanan dan kerusakan yang mengganggu hasil-hasil positif pertumbuhan kesadaran demokrasi yang selama ini telah dicapai, maka harus sesegera mungkin untuk diatasi permasalahan yang ada.

## **PERKEMBANGAN DEMOKRASI**

Demokrasi berawal dari sebuah pemikiran tentang hubungan antara hukum dan kenegaraan yang ada di Yunani Kuno yang dijalankan pada tata cara bernegara. Munculnya kurang lebih pada abad 4 Sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Waktu itu, demokrasi yang jalankan sifatnya langsung (*direct democracy*), artinya hak masyarakat memutuskan urusan

politik dilakukan dengan langsung bagi semua warga negara yang mengikuti aturan mayoritas. Dan juga demokrasi bisa digunakan untuk warga negara yang resmi. Sedangkan demokrasi tidak bisa dirasakan oleh budak, pendatang, pedagang dan anak-anak.

Pada tahun 600-1400 Masehi, tepatnya setelah kemenangan Benua Eropa serta Eropa Barat dari bangsa Romawi, gagasan yang sudah ada hilang. Meski era demokrasi pertama telah menghilang, sesuatu yang baru dan penting telah menjadi tonggak sejarah berkaitan dengan demokrasi, yaitu adanya piagam Magna Carta. Dalam Magna Carta terdapat 2 hal yang menjadi prinsip: 1. Adanya batasan kekuasaan bagi Raja; 2. Hak asasi manusia berada di atas kedaulatan raja. Di negara-negara maju, demokrasi yang ada berdasarkan perwakilan (*representative democracy*), tidak lagi bersifat langsung.

Sesudah terkuburnya beberapa saat, dua kejadian yang memicu munculnya kembali ide-ide demokrasi akhirnya terjadi, yaitu kebangkitan dan reformasi agama. Raissance adalah sekolah dengan membangkitkan lagi ketertarikan terhadap budaya serta sastra Yunani kuno, berdasarkan pada kebebasan dalam berpikir serta bertindak, tidak dibatasi oleh pihak lain. Reformasi yang ada yaitu reformasi keagamaan di wilayah Eropa Barat pada abad ke-16.

Jhon locke merupakan salah seorang yang menghubungkan ide-ide demokrasi pada tahun 1632-1704, hak politik rakyat meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara Indonesia menjalani proses demokrasi yang naik

turun. Berbagai tantangan yang menghampiri, terutama masalah ekonomi dan sosial serta kondisi politik, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Masalah dalam sistem yang ada dalam perpolitikan, seperti memiliki kecenderungan kekuatan politik yang dikuasai pemimpin dalam menjalankan pembangunan ekonomi, karakter, dan pembangunan bangsa dengan partisipasi rakyat.

Ada empat periode perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia:

1. Periode pertama adalah periode awal kemerdekaan (1945-1959), periode ini disebut demokrasi parlementer, yang menekankan pada demokrasi parlementer dan partai politik. Kelemahannya saat ini adalah memberikan peluang bagi partai politik dan republik demokrasi untuk berkuasa. Oleh karena itu, dalam menghadapi musuh bersama kian melemah serta tidak ada dorongan menjadi kekuatan yang menguntungkan setelah kemerdekaan.
2. Periode kedua tahun 1966-1965 (demokrasi terpimpin). Pada masa kedua tidak sedikit aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional ternyata banyak aspek yang terlihat dari demokrasi rakyat. Presiden pada saat itu mendominasi, partai politik tidak punya kekuatan, tumbuhnya doktrin komunis, serta peran ABRI dalam unsur sosial-politik semakin menyebar.
3. Periode ketiga yaitu pada tahun 1966-1998 (Demokrasi Pancasila Orde Baru) dengan demokrasi konstitusi tapi sistem presidensial yang digunakan. Tentunya dengan peran presiden yang sangat berpengaruh pada lembaga-

lembaga Negara lain, menjadi kelemahan masa periode ketiga. Pancasila pada saat itu dimanfaatkan sebagai legitimasi politis kekuasaan, karena dalam prakteknya tindakan yang dilakukan tidak sesuai nilai Pancasila.

4. Periode keempat yaitu pada tahun 1999 sampai saat ini, (Demokrasi Pancasila era Reformasi) dengan adanya kebebasan mendirikan partai dan berpolitik, yang akhirnya menciptakan kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan banyak partai dengan tujuan ingin membuat keseimbangan kekuatan antar lembaga Negara. Tentunya pada masa keempat kekuatan dari partai politik semakin menguat, sehingga ada napas dan harapan baru dalam dunia demokrasi. Hanya saja saat ini tidak begitu kuat pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Demokrasi di Indonesia**

Dari zaman dahulu, negara Indonesia sudah melakukan ide berkaitan dengan demokrasi, meskipun tingkatannya bukan kenegaraan, baru lingkup kecil yaitu desa (demokrasi desa). Seperti adanya pemilihan Kades dan adanya musyawarah tingkat desa. Itulah wujud demokrasi yang ada di desa. Setidaknya ada 5 hal yang menggambarkan demokrasi di desa yaitu adanya rapat, kesepakatan dengan gotong royong, hak menyanggah dan berbeda dari penguasa yang absolut melalui pendekatan kontekstual.

Demokrasi Pancasila menjadi paham yang dipakai di Indonesia, artinya meyakini bahwa Pancasila dijadikan ideologi di negeri kita, falsafah kehidupan berbangsa, serta sebagai dasar negara yang dijunjung tinggi wujud identitas nasional Indonesia. tentunya Pancasila bukan sekadar simbol negara, tapi bagian dari ideologi nasional, serta wujud cita-cita masyarakat dan juga dijadikan pedoman dalam memutuskan hal yang berkaitan politik, dengan tujuan untuk menyatukan masyarakat serta cara menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat, yaitu demokrasi.

### **Nilai-nilai Demokrasi**

Nilai-nilai demokrasi biasanya memuat nilai kebebasan berpendapat bagi rakyat, dengan harapan setiap warga masyarakat mampu menyampaikan pendapatnya. Selain itu, diberikan juga kebebasan berkelompok maksudnya demokrasi membolehkan rakyat untuk membentuk kelompok, bisa berwujud Ormas (organisasi masyarakat), membuat partai politik, atau membentuk kelompok-kelompok lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Bisa juga mendukung kelompok manapun sesuai kepentingannya.

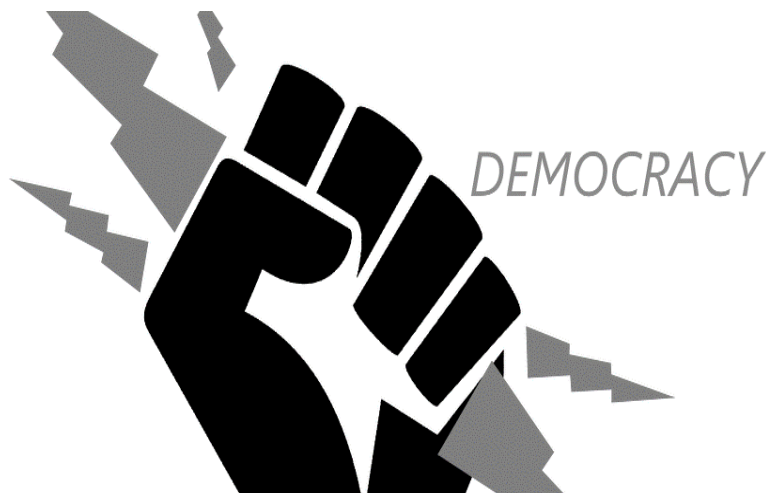
---

*Demokrasi memberikan jalan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok bisa bisa berwujud Ormas (organisasi masyarakat), membuat partai politik, atau membentuk kelompok-kelompok lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.*

Ada nilai kesetaraan yang dijunjung demokrasi, seperti adanya kesamaan hak setiap warga negara dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, setatus sosial ataupun agama mereka. Maksudnya setiap warga negara baik kaya, menengah, miskin, serta perbedaan lainnya, mereka diberikan hak yang sama dalam demokrasi. Semua juga memiliki kekuatan yang sama dihadapan hukum. Demokrasi juga mengajarkan kita dalam aspek kehidupan dengan tidak menghina dan mencela orang atau kelompok lain yang berbeda, melatih kerjasama, belajar berkompetisi dengan sehat dan berbagai nilai kebaikan lainnya.

Dalam demokrasi pancasila, banyak nilai yang ada dalam nilai-nilai pancasila antara lain :

1. Kedaulatan rakyat;
2. Republik
3. Negara berdasar atas hukum
4. Pemerintahan yang konstitusional
5. Sistem perwakilan
6. Prinsip musyawarah



*“Pendidikan politik rakyat hanya akan berhasil dalam sistem yang demokratis dan adanya jaminan atas HAM”*

*-Munir (Aktivis Ham) -*

## **Pengertian Partisipasi Politik**

**T**idak ada demokrasi tanpa partisipasi. Terlaksananya demokrasi di sebuah negara bisa sehat dan berkualitas jika masyarakatnya memiliki keterlibatan (partisipasi) yang kuat dalam ranah politik. Kita bisa lihat di Indonesia, tidak sedikit yang memilih golput pada waktu Pemilu. Mereka tidak peduli dan tidak ikut memilih serta tidak mau datang ke tempat pemungutan suara. Hal tersebut merupakan gambaran tidak kuatnya partisipasi politik warga negara Indonesia. Tentu semua itu bukan tanpa sebab, tapi karena banyak masyarakat yang apatis akan perpolitikan yang ada di Indonesia. Pemilu dianggap aktivitas tidak penting dan hanya menguntungkan pihak elit.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik, baik dalam rangkaian pemilihan ataupun aktivitas

politik lainnya. Partisipasi politik masyarakat sejatinya dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang dilakukan. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang pemahamannya tidak sejauh itu. Mereka hanya tahu, bahwa politik adalah menentukan pilihan saja. Mereka merasa tidak penting, Golput ataupun tidak nasibnya sama saja. Itu pemikiran sederhana di benak masyarakat.

Konsep berpartisipasi pada perpolitikan mempunyai implikasi mendalam. Terlihat dari ulasan ataupun penjelasan teoritis para ahli tentang urgensinya partisipasi sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan dalam pembangunan (Tangkilisan, 2005: 320). Partisipasi mengacu pada keikutsertaan masyarakat umum (tanpa kekuasaan) berpartisipasi dalam proses mempengaruhi perumusan dan terlaksananya perpolitikan dalam bentuk kebijakan publik. Aktivitas masyarakat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1) aktivitas yang dapat berpengaruh pada kebijakan publik; (2) berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan keputusan politik. Artinya, partisipasi politik adalah sejenis perilaku politik dan tidak mesti ada dalam bentuk partisipasi politik.

Menurut Syahril (2011: 123), partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun sekelompok orang yang aktif berpartisipasi pada perpolitikan, contohnya saat menentukan presiden dalam pemilu, ikut aktif dalam memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah. Handoyo



(2013: 248) menjelaskan dalam ilmu politik ada kajian khusus tentang partisipasi politik yang mendalam dipelajari pada teori Sosiologi Politik. Adapun Meriam Budiardjo (2008: 367) menyebutkan bahwa secara umum partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, bisa dalam bentuk memilih presiden yang tentunya berpengaruh (baik langsung ataupun tidak) dalam perumusan kebijakan. Partisipasi bisa dilakukan ikut dalam pemilihan umum, datang pada acara rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota DPR, aktif di kegiatan partai atau jadi simpatisan partai yang aktif di setiap kegiatan partai.

Herbert McClocky (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 146), menjelaskan Partisipasi politik merupakan aktivitas ikhlas masyarakat dengan cara masyarakat ikut menjalankan proses memilih pemimpin serta terlibat pada rangkaian dibentuknya kebijakan public, bisa dengan terlibat langsung ataupun tidak. Makna Partisipasi politik yang lain disebutkan oleh Parry, Mosley dan Day (Agustino, 2007:59) menyebutkan bahwa, “keterlibatan pada saat formulasi, pelegalan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah”. Apabila demikian, bagian penting partisipasi yaitu kepatuhan masyarakat dalam rangka memberikan pengaruh pada keputusan DPR serta para pejabat pemerintah.

Kenyataannya sulit kita pungkiri bahwa sesungguhnya partisipasi politik banyak dikaitkan pada sikap serta aktivitas individu dan kelompok berhubungan dengan kegiatan pemilihan, kampanye, hingga demonstrasi yang seluruhnya

ditujukan untuk pemerintah guna memberikan pengaruh pada berbagai keputusan politik yang sedang direncanakan dan bisa juga pada keputusan yang sedang dijalankan.

Lebih detail, Dusseldorp (1981) menjelaskan partisipasi adalah aktivitas/kondisi melakukan tindakan guna mewujudkan kebermanfaatan lebih maksimal. Lebih lanjut Cohen Da Uphoff (1979), menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan pada proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, untuk mendapatkan manfaat, serta memberikan evaluasi terhadap kebijakan. Selain hal tersebut, Dafis (1977), mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan mental serta adanya sikap emosi individu pada kondisi kelompok dengan memberikan dorongan padanya untuk menyumbang terwujudnya tujuan serta membagi tanggung jawab di antara mereka (Basrowi, 2012: 65).

Dari beberpa penjelasan di atas dapat disimpulkan, tentang jenis-jenis makna partisipasi politik (Rahman, 2007: 2):

- 1) Berkaitan dengan aktivitas yang bisa dilihat serta bukan tentang perilaku atau orientasi. Partisipasi politik berkaitan sesuatu yang bukan subjektif tapi objektif.
- 2) Aktivitas politik masyarakat biasa sebagai warga negara dapat dilakukan dengan langsung maupaun tidak langsung (lewat perantara).
- 3) Aktivitas ini tujuannya sebagai upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan kebijakan bisa dengan rayuan atau pressing, dan juga penolakan pada tokoh politik serta pemerintah.

- 4) Aktivitas ditujukan sebagai upaya mempengaruhi pemerintah tanpa berpikir hal yang muncul dan apakah gagal atau berhasil.
- 5) Aktivitas dijalankan bisa dengan cara yang wajar serta tanpa kekerasan ataupun dengan prosedur diluar kewajaran dalam bentuk kekerasan.

Partisipasi politik merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan yang akan berdampak pada hidupnya. Kita harus paham, bahwa masyarakat yang berperan dalam melakukan kegiatan politik itu merupakan masyarakat yang memiliki posisi di pemerintahan. Serta masyarakat umum (tidak punya

jabatan) adapun pemerintah punya kewewenangan baik di perencanaan ataupun pelaksanaan keputusan politik. Meskipun begitu, masyarakat berhak mempengaruhi pada langkah proses dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Aktivitas yang masuk pada pengertian partisipasi politik meliputi berbagai hal berikut (Sastroatmodjo, 1995: 8) :

***“Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya”***

- 1) Partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat umum yang bisa dilihat serta tidak berupa sikap serta orientasi.

- 2) Aktivitas tersebut dilakukan supaya pemerintah terpengaruh sebagai perumus serta yang menjalankan keputusan politik.
- 3) Aktivitas sukses maupun yang tidak berhasil memberikan pengaruh pada keputusan politik juga masuk pada pengertian partisipasi politik.
- 4) Aktivitas memberikan pengaruh politik pemerintah bisa dilaksanakan baik langsung ataupun tidak.
- 5) Aktivitas memberikan pengaruh pada pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara yang wajar tanpa kekerasan, dan dengan prosedur tepat.
- 6) Aktivitas perorangan tujuannya mempengaruhi pemerintah. Aktivitas dijalankan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain.

## **Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi politik**

Samuel P.Huntington serta Joan Nelson, (1983) menjelaskan tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia bisa dengan dua cara:

- (1) Partisipasi politik otonom, merupakan sebuah partisipasi karena kesadaran sendiri.
- (2) Partisipasi politik karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar.

Umumnya partisipasi otonom ada sebab dipahaminya persepsi objek politik secara penuh. Kepahaman tadi membuat pengertian lengkap terhadap kenyataan pada objek politik,

yang menyebabkan afeksi pada wujud keputusan yang berpihak kepada objek politik tertentu dengan penuh kesadaran tidak ada tekanan atau paksaan.

Kebalikannya partisipasi politik yang dikordinir keluar disebabkan adanya tekanan sejumlah faktor asal dari eksternal pelaku politik tadi serta umumnya mengesampingkan proses membangun konsep dari persepsi pada kejadian objek politik. Sebagai akibatnya partisipasi semacam ini umumnya cirinya insidental serta tidak abadi, sebab adanya saingan dan aneka macam hal yang bisa berpengaruh pada keputusan keberpihakan seseorang pada objek politik eksklusif. Karena sebab ini banyak yang mengakibatkan muncul oportuniste seorang pada politik.

Ramlan Surbakti (2010:184) menjabarkan tentang berbagai hal yang dianggap bisa menghipnotis besar kecilnya partisipasi politik individu adalah masalah kesadaran politik. Adapun hal dari luar mencakup kinerja pemerintah, partai politik serta rasa percaya masyarakat. Adapun kesadaran politik artinya kesadaran adanya hak serta kewajiban menjadi rakyat dalam lingkup sebuah negara. Hal tersebut berhubungan dengan *knowledge* seorang tempat tinggal masyarakat serta politik dan berkaitan dengan keinginan seorang dimana tempat mereka hidup, ikap serta pedoman agama juga kadang berpengaruh. Faktor lain adalah penilaian seorang tentang kondisi ekonomi serta sosial mereka, rekanan politik keturunan dan adanya rentetan organisasi yang menjadikan dasar politiknya.

Kondisi sosial merupakan setatus seorang pada masyarakat sebab adanya berbagai faktor bisa dari derajat orang tua, tingkatan lulusan sekolah serta status pekerjaan. Kondisi ekonomi merupakan setatus yang berkaitan pada lapisan warga sesuai jumlah harta yang dimiliki. Kaitannya dengan harta bisa terlihat berasal dari jumlah pendapatan, serta pengeluaran, bisa juga dari kepemilikan harta benda lainnya. Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi baik secara ekonomi ataupun sosial, bukan saja mempunyai pengetahuan tentang perpolitikan, tapi biasanya mempunyai keinginan serta perhatian di bidang politik (ada keinginan jadi pejabat).

Terkait pencerahan politik hal serupa pula dijelaskan oleh Mirian Budiardjo (2008:369) yang mengungkapkan tentang partisipasi politik dekat hubungannya dengan kesadaran politik, sebab jika ia kesadarannya tinggi bahwa ia diperintah, lalu ia meminta hak adil dalam bersuara di penyelenggaraan pemerintah. Perasaan sadar semacam tersebut berasal dari manusia yang berpendidikan serta kondisi hidup baik serta orang-orang terkenal dan terhormat. Marian ikut menambahkan pada penjelasan tentang negara-negara demokrasi biasanya menduga jika beragam jenis partisipasi yang ada pada masyarakat justru bisa semakin baik. Artinya, besarnya jumlah partisipasi menunjukkan kondisi masyarakat siap ikut serta memahami problem politik serta ingin berpartisipasi pada berbagai aktivitas yang ada. Justru sebaliknya, partisipasi tidak tinggi biasanya disebut sebagai tanda yang kurang baik, sebab bisa diartikan sebagian besar

rakyat tidak memberikan perhatian pada duduk perkara negara.

Kesadaran politik rakyat sebagai bagian dari negara merupakan faktor penentu partisipasi politik rakyat, yaitu berbagai pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lingkungan hidup rakyat dan kegiatan politik merupakan besaran dan tingkat partisipasi seseorang dalam politik.

W.Page (Rahman, 2007:289) melihat berdasar kondisi tersebut membagi partisipasi menjadi empat model :

- 1) Jika seorang mempunyai pencerahan politik serta kepehaman terhadap sistem pemerintah besar, tentu partisipasi politik akan aktif.
- 2) Kebalikannya tingkat sadar serta kepehaman juga keyakinan rendah, tentu partisipasi politik akan semakin pasif serta apatis.
- 3) Kesadaran politik besar tapi tidak terlalu percaya pada pemerintah, tentu sikap yang ada yaitu militan radikal.
- 4) Kesadaran politik kecil namun keyakinan pada pemerintah besar, maka partisipasi sangat pasif, ialah fokusnya pada *output* politik.

Warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pada Pemilu dengan memberikan hak suara/aktivitas lain untuk berpartisipasi pada jalannya Pemilu, terdorong oleh keyakinan tentang aktivitas dilaksanakan

rakyat tersebut buat kepentingan beserta menentukan calon pemimpin terpilih untuk kesejahteraan masyarakat. Keaktifan dalam partisipasi politik setidaknya bisa berpengaruh pada langkah kepala wilayah yang terpilih pada perumusan serta kebijakan dan keputusan yang mengikat. Karena itu, mereka yakin bahwa aktivitas mereka memiliki dampak politik.

## Tipologi Partisipasi Politik

Sikap politik seseorang bisa dilihat wujud partisipasi politik yang dijalankannya. Sebagian orang yang berpikiran bahwa warga serta sistem perpolitikan yang ada dievaluasi sudah menyimpang dari hal yang dambakan, sebagai akibatnya banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada politik. Ada beberapa cara untuk menghasilkan kategori atau jenis partisipasi politik. Menurut klasifikasi partisipasi politik menurut Surbakti, Meriam Budiardjo, Mas'oeed, dan Mc Andrews (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 147-152) misalnya dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. sesuai dengan tingkat, frekuensi dan intensitas kesadaran politik, partisipasi reguler dan nonkonvensional dalam politik. Tipe politik tersebut adalah:

1. Digolongkan menjadi partisipasi aktif serta partisipasi pasif. Partisipasi aktif artinya aktivitas berdasarkan berorientasi di proses input serta hasil politik, adapun partisipasi pasif



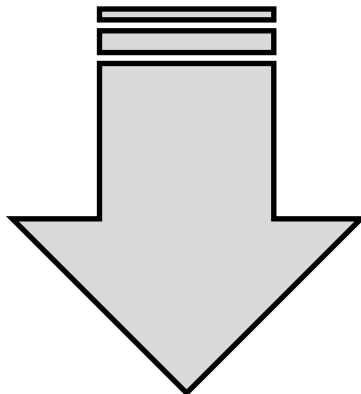
adalah aktivitas berorientasi pada *output*. Sastroatmodjo (1996: 74) menjabarkan bahwa partisipasi aktif mencakup kegiatan rakyat sebagai warga negara usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang tidak sama dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik serta saran perbaikan buat meluruskan permasalahan, membayar pajak, dan ikut dan pada aktivitas pemilihan pimpinan pemerintahan. Selain itu, partisipasi pasif, bisa berupa diantaranya, bentuk kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima serta melaksanakan semua keputusan pemerintah.

2. Melihat klasifikasi partisipasi politik dari perspektif stratifikasi sosial. Olsen berpendapat bahwa partisipasi politik ditinjau dari perspektif stratifikasi sosial, meliputi enam tingkatan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, dan komunikator (menerima dan menyampaikan ide, pemikiran, sikap, dan informasi politik baru lainnya kepada orang lain (rakyat), komunitas nasional, orang-orang yang terpinggirkan (mereka yang jarang menandatangani kontrak politik), dan orang-orang yang terisolasi (partisipasi sporadis dalam politik).
3. Bagi jumlah peserta politik dengan jumlah aktor Bagi jumlah peserta politik dengan jumlah aktor, yaitu individu dan kolektif. Artinya surat tersebut berisi permintaan atau pengaduan kepada pemerintah. Pada saat yang sama, partisipasi kolektif mengacu pada kegiatan di mana rakyat negara secara bersamaan mempengaruhi otoritas, seperti kegiatan pemilihan umum.

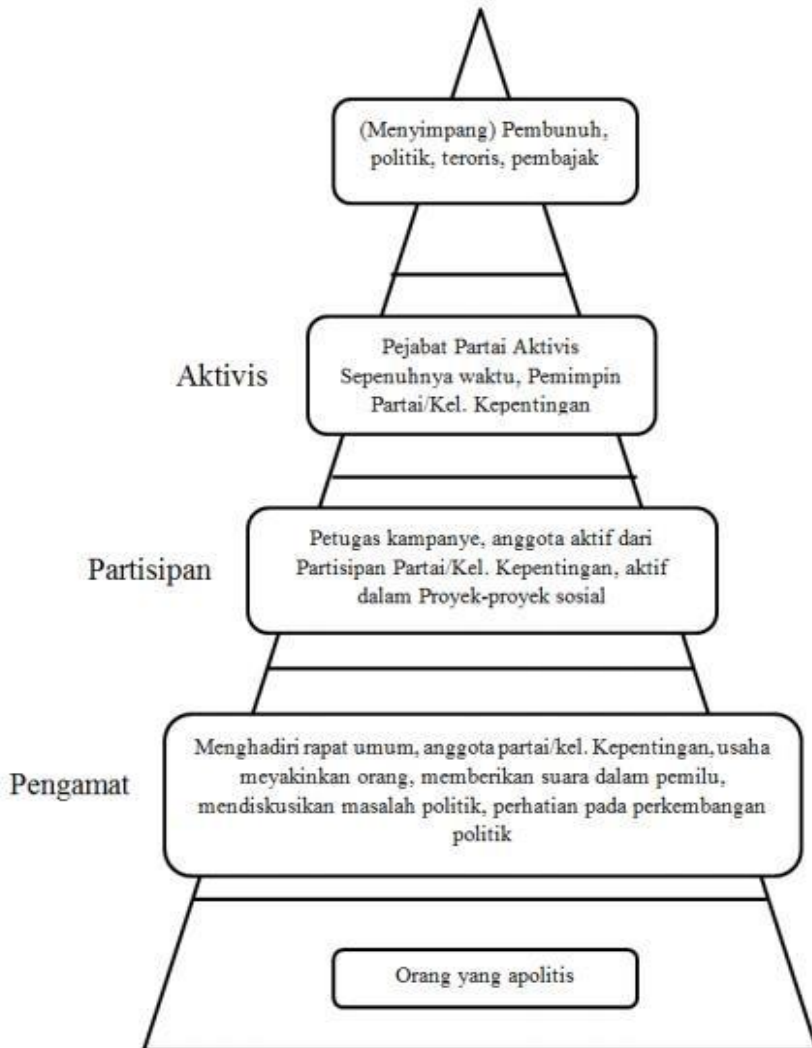
4. Klasifikasi partisipasi politik menurut tingkat kesadaran politik dilihat dari kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), partisipasi dibagi menjadi empat jenis. Partisipasi aktif, partisipasi aktif dalam depresi (ketidakpedulian), partisipasi radikal dan partisipasi pasif.

Jika seseorang memiliki pencerahan politik dan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasinya sering aktif. Begitu pula sebaliknya, jika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik seringkali pasif (pressure indifference). Partisipasi radikal terjadi ketika kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah. Jika kesadaran politik rendah tetapi keyakinan agama pada pemerintah tinggi, partisipasi semacam ini disebut tidak aktif (pasif).

5. Dikelompokkan partisipasi politik berdasar frekuensi dan intensitas. Dalam hal ini, partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi aktifis, partisipan serta pengamat. Partisipasi politik berdasar intensitas serta frekuensi, dijelaskan dengan bentuk piramida partisipasi sebagai berikut.



Tingkatan Partisipasi Politik Piramida partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank I. Wilson (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 94)



Struktur hierarki piramida partisipasi politik yang ditunjukkan pada gambar dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat partisipasi politik dalam kekuasaan dan berlaku untuk semua jenis sistem politik. Definisi tersebut berasal dari berbagai kelas pada gambar di atas. Tentu saja dilihat dari skala kegiatan yang berkaitan dengan politik, kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain. Non-politisi berpartisipasi dalam pertemuan non-profesional, anggota partai politik/kelompok kepentingan, mencoba membujuk orang untuk memilih dalam pemilu, mendiskusikan dilema politik, dan memperhatikan perkembangan politik.

Menurut gambar di atas piramida, aktivis termasuk pejabat partai penuh waktu, pemimpin partai, atau pemangku kepentingan. Beberapa peserta termasuk pejabat kampanye, anggota aktif partai politik atau kelompok kepentingan, dan berpartisipasi aktif dalam proyek sosial. Pengamat termasuk anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan non-profesional, partai politik atau kelompok kepentingan, mendiskusikan dilema politik, update dengan info politik lewat media masa, dan ikut serta pada pemilu. Kelompok paling akhir dari piramida partisipasi tersebut artinya apolitis.

6. Kelompok partisipasi politik pada konvensional serta nonkonvensional. Gabriel Almond, pada sosialisasi, kebudayaan serta partisipasi politik (Cholisin, 2012: 150) menjelaskan partisipasi politik sebagai konvensional serta nonkonvensional. Kegiatan politik konvensional merupakan

partisipasi politik yang wajar pada demokrasi modrn. Wujud nonkonvensional baik sebagian yang mungkin mirip petisi serta ilegal, mirip perilaku politik yang berisi kekerasan, serta revolusioner. Wujud frekuensi partisipasi politik bisa dipakai sebagai penilaian buat mengukur kesetabilan politik, integritas politik, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Cohen dan Uphoff (1979) membedakan empat jenis partisipasi, yaitu: 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2. Berpartisipasi dalam implementasi. 3. Berpartisipasi dalam pemanfaatan. 4. Berpartisipasi dalam evaluasi. Jika keempat jenis partisipasi ini dilakukan secara bersama-sama atau secara keseluruhan akan memunculkan potensi kegiatan yang komprehensif (Basrowi, 2012: 66).

Milbrath dan Goel (Sastroatmodjo, 1995: 74-75) membagi partisipasi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama adalah ketidakpedulian, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, bystander, yaitu orang-orang yang setidaknya pernah mengikuti pemilihan umum. Ketiga, gladiator adalah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu komunikator yang menggunakan tugas tertentu untuk mengadakan pertemuan tatap muka, aktivis partai politik dan petugas kampanye, dan aktivis masyarakat. Yang keempat adalah Kritik, yaitu orang berpartisipasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional.

Walaupun partisipasi politik terdapat beberapa wujud, dalam hal sikap politik serta macam-macam politik dapat dijelaskan sebagai berikut ini: memberikan hak suara pada aktivitas pemilu merupakan wujud partisipasi politik yang biasa, sedikit lebih luas daripada partisipasi politik lain. Aktivitas

partisipasi politik tersebut walaupun hanya berkaitan dengan masalah suara, sejatinya berkaitan dengan macam-macam janji politik pada saat kampanye, berbuat membantu rakyat, mencari dukungan buat calon, serta aktivitas yang tujuannya guna memberi pengaruh pada masyarakat akibat investigasi. Walaupun begitu, harus memahami bahwa kegiatan pemilu adalah wujud partisipasi politik kolektif yang besar serta akbar dan jadi pembeda partisipasi politik lain (Sastroatmodjo, 1995: 78).

## **Model Partisipasi Politik**



Secara prinsipil, demokrasi memiliki arti partisipasi semua warga pada kebijakan politik serta melaksanakan pemerintahan. Kebijakan politik tersebut artinya konvensi diputuskan sebagai aturan dengan tujuan menata kehidupan semua warga masyarakat. Kesadaran politik dalam suatu negara sebagai wujud determinan pada partisipasi politik masyarakat, merupakan aneka macam hal knowledge serta kesadaran pada hak dan kewajiban kaitannya pada daerah warga, serta politik sebagai hal yang berpengaruh dengan kehidupan seseorang yang menjadi bagian dalam proses partisipasi politik.

Faktor kesadaran politik serta keyakinan pada kemampuan pemerintah bukan faktor yang muncul sendiri. Faktor ekonomi serta situasi yang ada menjadi bagian yang berpengaruh pada faktor tersebut. Afiliasi politik, pengalaman

berorganisasi menjadi variabel yang berpengaruh dengan independent. Pencerahan politik serta keyakinan pada pemerintahan menjadi variabel antara intervening variabel serta partisipasi politik merupakan variabel terpengaruh (dependen).

## **Penyebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik**

Di negara kita pada masa sekarang ini, kata partisipasi politik cenderung dihubungkan pada dukungan masyarakat untuk menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan para pemimpin politik serta pemerintahan. Sebaliknya sporadis kita bisa menerima masukan serta menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan Weiter (dalam Syahrial, 2011), ada lima hal yang menjadi sebab munculnya aktivitas ke arah partisipasi yang lebih besar dalam proses politik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua bidang kehidupan yang semakin maju dan modern menjadikan masyarakat semakin banyak mengajukan tuntutan supaya masuk dalam kekuasaan politik.
- 2) Kelas sosial yang setrukturnya banyak berubah. Urusan siapa yang memiliki hal dalam berpartisipasi dan penetapan keputusan politik menjadi bagian penting serta berakibat pada perubahan sistem partisipasi politik.
- 3) Dampak adanya masyarakat intelektual serta mengetahui komunikasi massa modern. Ide demokrasi

partisipasi sudah meluar ke bangsa-bangsa lain sebelum mereka berbagi modernisasi serta industrialisasi cukup matang.

- 4) Konflik antar kelompok politik. Apabila keluar konflik antar elit, akan dicari dukungan masyarakat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristocrat, sudah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih warga .

Pemerintah mempunyai andil sangat bear dalam berbagai hal, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta buday. Keleluasaan yang dimiliki pemerintah banyak melahirkan tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik.

Agustino (2007:59) juga menjelaskan bahwa partisipasi politik, baik itu mempengaruhi isi kebijakan maupun berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan isi kebijakan, akan ada dan lebih tinggi, jika: pertama, ada modernisasi. Ketika penduduk kota baru dimodernisasi, serupa: Pekerja perdagangan dan profesional merasa bahwa mereka dapat menghipnotis nasib mereka sendiri dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah, oleh karena itu, berdasarkan asumsi yang ditetapkan, mereka semakin menuntut partisipasi aktif dalam politik. Sastroatmodjo (1995: 89) juga menjelaskan hal yang sama. Kemajuan telah memungkinkan orang-orang di kota-kota baru, seperti pekerja, pengusaha, dan profesional, untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan dan mengharuskan mereka untuk



berpartisipasi dalam kekuasaan politik. Sebagai bentuk, mereka menyadari bahwa mereka dapat mempengaruhi Takdir mereka sendiri.

**Kedua**, berbagai perubahan struktur kelas sosial masyarakat juga akan berdampak pada kebangkitan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat berubah, akan terbentuk kelas sosial baru yang belum pernah ada dalam masyarakat tradisional. Bagian kedua bermula dari terbentuknya berbagai kelas sosial baru, yang berarti bahwa kelas pekerja dan kelas menengah baru terus berkembang dan berubah dalam proses industrialisasi dan modernisasi. Dalam masyarakat yang terus berubah di mana legitimasi tradisional telah dirampas, pertanyaan atau isu tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik menjadi sangat penting, dan juga telah menyebabkan perubahan dalam cara partisipasi politik publik.

**Ketiga**, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa terkini, serta inspirasi demokrasi partisipatif telah menyebar jauh sebelum modernisasi dan industrialisasi negara-negara yang baru merdeka relatif matang. Dengan institusi tersebut mendorong partisipasi politik masyarakat menggelora. Kita harus akui bahwa reformasi 1998, memiliki dampak luas pada gerakan-gerakan demokrasi di semua wilayah.

**Keempat**, bahwa partisipasi dalam masyarakat semakin tinggi karena adanya berbagai problematika dalam lingkup pemimpin politik.

**Kelima**, peran strategis pemerintah yang sangat luas dalam hal sosial, ekonomi dan budaya melahirkan banyak kritik

yang akhirnya memperluas partisipasi politik warga. Semakin luasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah dalam banyak aspek kehidupan membuat masyarakat berani memunculkan tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk dapat terlibat secara aktif dalam keputusan kebijakan publik. Masyarakat menganggap bahwa monopoli kebijakan yang dilakukan pemerintah, tidak akan berdampak sesuai harapan karena tidak implikatif.

Milbrath (Sastroatmodjo, 1995) memberikan empat alasan berbeda bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Alasan pertama melibatkan penggunaan

insentif politik untuk menerima. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap rangsangan politik melalui kontak langsung, organisasi, dan media massa akan berdampak pada partisipasinya dalam kegiatan politik. Namun, respon terhadap stimulus politik pasti akan dipengaruhi oleh pengetahuan, perilaku, nilai, pengalaman, dan kepribadian seseorang.

Jika seseorang memperoleh gosip dan materi terkait konflik dari stimulus politik yang diterimanya, ia akan merasa mampu menyelesaikan konflik politik yang ada. Di sisi lain, mereka yang merasa tidak memiliki informasi tentang masalah

---

*Seseorang individu akan merasa mampu memecahkan permasalahan- permasalahan politik yang ada, apabila ia cukup memiliki informasi dan bahan-bahan mengenai permasalahan tersebut yang diperolehnya dari perangsang politik yang diterimanya.*

---

ini cenderung diam dan percaya bahwa mereka tidak mampu menyumbangkan ide mereka untuk mengatasi masalah politik. Karena itu, dapat dijelaskan tentang info politik serta ilmu pengetahuan politik yang dimiliki memiliki makna urgen dalam memberikan pengaruh keikutsertaan seseorang terhadap partisipasi politik.

Hal lainnya kaitanya dengan menggunakan kondisi sosial seseorang meliputi status ekonomi, karakter, suku, usia, jenis kelamin, keyakinan serta agama. Faktor-faktor tersebut merupakan karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam politik. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka kepribadian seseorang mempunyai pengaruh yang cukup besar dan relatif besar terhadap partisipasinya. Alasan ketiga terkait dengan hakikat kehidupan pribadi dan sistem kepartaian. Hal ini terkait dengan sistem politik dan sistem kepartaian yang diperoleh dalam lingkungan politik.

Bagi masyarakat yang hidup di negara demokrasi, partainya cenderung mencari dukungan massa dengan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Alasan keempat untuk Milbrath adalah perbedaan regional. Perbedaan wilayah ini merupakan aspek lingkungan yang mempengaruhi perbedaan karakter dan perilaku pribadi. Perbedaan daerah juga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik (Sastroatmodjo, 1995: 93-94).

Faktanya, perilaku politik warga negara selalu berkisar dari tidak berpartisipasi sama sekali hingga partisipasi terbatas hingga partisipasi penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik sama sekali memiliki sikap kolot atau apatis. Alasannya mungkin: (1) sikap acuh tak acuh (2) tidak tertarik pada politik (3) kurangnya pemahaman

tentang isu-isu politik, atau tidak (pengaruh yang tidak pasti ) Akankah perjuangan kebijakan publik berhasil?). Namun, ketidakpedulian dapat memiliki makna positif selain menjadi negatif. McClosky dalam Arifin (2011: 211) mengemukakan bahwa perilaku orang acuh tak acuh membantu memberikan keleluasaan pada sistem politik, karena jika seluruh rakyat negara berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, justru akan menimbulkan konflik, dan perpecahan. stabilitas akan menjadi politik. Hasil dari ketidakpuasan.



## PARTAI POLITIK

*“Tidak ada partai politik yang memiliki hak paten eksklusif  
untuk kesejahteraan”*

*- Franklin D. Roosevelt-*

Melihat kedudukannya menjadi pilar demokrasi, partai politik mempunyai kiprah krusial pada sistem perpolitikan secara nasional, yaitu sebagai tempat terjaringnya kepemimpinan nasional serta daerah. Kiprah partai politik sudah menyampaikan kontribusi yang signifikan pada sistem politik nasional, khususnya pada tatanan masyarakat Indonesia menuju kemajuan dan sedang berubah menuju pada kondisi dan keadaan lebih baik. Bila kapasitas serta kerja partai politik bisa dimaksimalkan, tentu dapat berpengaruh signifikan pada kenaikan kualitas demokrasi pada negeri kita.

Partai politik ialah organisasi berasal aktifis-aktifis politik dengan tujuan memperoleh kekuasaan pemerintah dan meraih simpatisan masyarakat sebagai modal untuk bersaing dengan kelompok lain yang mempunyai langkah poliotik berbeda (Budiarjo 1991: 195-196 ). Kita harus memahami beberapa definisi yang pernah diusulkan oleh para pakar ilmu politik antara lain:

**Sigmund Neumann** menyampaikan bahwa parpol merupakan organisasi yang memiliki rangkaian aktivitas politik dengan tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan cara berusaha mencari dukungan masyarakat pada konteks persaingan dengan organisasi atau golongan lain yang mempunyai cara politik berbeda.



**Carl J. Friedrich** menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil memiliki

tujuan untuk mengamankan kekuasaan pemerintahan khususnya untuk pimpinan partainya yang berdampak pada keuntungan anggota partai juga.



**H. Soltou** menjelaskan bahwa parpol maknanya

kelompok masyarakat yang terorganisir dan melangkah dalam suatu kekuatan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk menentukan, menguasai pemerintahan, serta melaksanakan keputusan.



Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan aktivitas terorganisir dengan tujuan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara.

Sebelum kita membahas perkembangan parpol yang ada di Indonesia, kita harus memahami bahwa sistem kepartaian di masing-masing negara tidaklah sama. Namun bisa digolongkan secara sederhana menjadi 3 sistem :

- ☞ Sistem partai tunggal, artinya hanya satu partai yang eksis. Tidak ada partai oposisi dan menjadikan wewenang besar bagi partai untuk mengontrol pemerintahannya. Negara yang menjalankan sistem kepartaian tersebut yaitu Kuba, Korea Utara, Pantai Gading, dan Guinea.
- ☞ Sistem Dwi Partai, atau negara yang hanya punya dua partai. Karena ada dua, maka fungsinya sangat jelas, satu berperan menjadi pemerintah satunya oposisi. Sistem seperti ini ada di Amerika Serikat.
- ☞ Sistem Multipartai, Partai yang ada di negara tersebut lebih dari dua partai. Memang banyak faktor yang bisa melahirkan banyak partai, tentu juga karena adanya peraturan di negara tersebut yang membolehkan ada dua partai. Banyak partai yang muncul bisa jadi karena ada berbagai perbedaan, bisa dari ideologi, suku, ras dan sebagainya. Negara yang memakai sistem ini contohnya di Indonesia.

Di Indonesia, keragaman di negara kita telah menjadi ciri utama warga nusantara. Integrasi sosial yang tertuang dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 menunjukkan bahwa menyatukan kekuatan bangsa Indonesia berarti mewujudkan visi besar kemerdekaan dalam kebhinekaan yang ada dalam segala bentuknya, termasuk keanekaragaman ideologi. Pencerahan nasional menjadi perwujudan negara merdeka, dan lahirlah beberapa model partai dengan prinsip dan ideologi yang berbeda.

Misalnya, Budi Utomo dan Muhammadiyah memiliki landasan sosial. Masyumi, Partai Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) semuanya berbasis agama. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki ideologi nasionalis. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengusung ideologi komunis. Beberapa partai tersebut sudah mulai ada karena Indonesia masih berada di bawah kekuasaan sistem kolonial Belanda. Pada waktu pendudukan Jepang, kegiatan partai politik dihentikan hanya kelompok Islam yang membuat Partai Masyumi. Berikut periode perjalanan partai politik kita:

1. Di tahun 1945. Masa perpindahan dari penjajah ke pendiri bangsa Indonesia. Parpol yang tadinya hilang kembali bermunculan. Saat itu partai bersaing dengan terbuka.
2. Periode demokrasi liberal (1945-1959). Kali ini ditandai menggunakan kebebasan untuk membentuk partai politik. Peran partai politik jauh lebih didominasi dalam struktur pemerintah. Namun, dominasi partai-partai politik sebenarnya menciptakan kerentanan terhadap divisi. Setiap elit politik khawatir tentang kelasnya atau partai



politiknya yang mengambilnya. Pemerintah berjalan tidak stabil. Periode demokrasi liberal berakhir dengan menggunakan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Di masa ini, kiprah Presiden sangat mendominasi dalam struktur pemerintahan. Papol semakin lemah sebab wewenangnya dibatasi sebagaimana tertulis pada Dekrit Presiden. Namun dinamika politik meruncing pada rivalitas tiga kubu besar, yaitu antara Sukarno yang didukung PNI, PKI yang berhaluan komunis, dan Militer. Periode ini berakhir menggunakan adanya peristiwa yang disebut oleh rezim setelahnya sebagai G 30 S / PKI.
4. Masa Orde Baru (1966-1998). Era ini dirampingkan oleh rezim Orde Baru. Jumlah partai disederhanakan sebagai 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia. PPP artinya adonan asal NU, Parmusi, PSII, serta Partai Islam. Golkar ialah partai penguasa. PDI merupakan gabungan dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan PKI. Masa orde baru berakhir sehabis peristiwa reformasi 1998.
5. Masa reformasi (1998-sekarang). Masa ini dimulai sehabis mundurnya Suharto sebagai presiden. Papol yang semula tiga berkembang biak menjadi 48 ikut pemilu 1999. Reformasi berhasil mengubah struktur politik secara fundamental. Pemimpin pemerintahan, yaitu Presiden serta Wapres serta DPR sejak pemilu 2004 dipilih langsung sang masyarakat. Sampai hari

ini, Indonesia masih mengadopsi sistem multipartai kendati jumlahnya tidak selalu konsisten.

Kemudian, sesuai dengan definisi yang dikembangkan oleh Neuman, Hari Cheppy Cahyono (Cahyono, 1991: 195-196) bahwa ada empat hal yang berkaitan dengan perjuangan untuk mengklarifikasi pemahaman istilah partai politik. Keempat hal ini adalah:

- 1) Partai-partai politik adalah organisasi yang melakukan kegiatan politik dalam masyarakat;
- 2) Partai politik mendedikasikan perhatian pada realisasi pemerintah untuk melaksanakan kekuasaannya;
- 3) Partai politik mencoba mendapatkan dukungan dari berbagai jenis gerombolan dan kelompok orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda; dan
- 4) Partai-partai politik adalah simbol mediator yang menghubungkan kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang di warga menggunakan pejabat pemerintah dan forum negara.

Melalui beberapa definisi pada bagian sebelumnya, setidaknya dapat dijelaskan konsep partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan harapan akan kekuasaan. Terutama dalam perebutan kekuasaan negara. Dalam iklim negara demokrasi, pembentukan partai politik membutuhkan simpati dan dukungan suara dari anggota partai (kader) dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh otorisasi kekuasaan (legitimasi) melalui pemilihan umum. Partai politik mencoba menggunakan

lembaga yang menerapkan kebijakan politik untuk menggabungkan kepentingan massa luas.

Partai politik merupakan wadah untuk menyampaikan opini publik, masyarakat dapat berpartisipasi, dan memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilu. Pemilu 1999, 2004, dan 2009 bukanlah pemilu multipartai pertama. Banyak juga partai politik (multipartai) pada tahun 1955. Saat itu ada 36 partai (36 gambar), tahun 1999 ada 48 partai, tahun 2004 ada 24 partai, tahun 2009 ada 44 partai. terdiri dari 38 partai, ada 6 partai politik nasional dan 6 partai politik daerah, dan jumlah orang terus berubah setiap periode pemilu.

Banyaknya partai politik melambangkan negara demokrasi, sehingga perlu menjadi saluran bagi daya tarik masyarakat yang beragam dan penyeimbang kekuatan politik. Demikian pula, dengan bertambahnya jumlah partai politik, mereka harus menjadi platform untuk mengontrol pemerintah dan sarana untuk mengkritik sistem yang berkuasa. Adapun pro kontra suburnya politik mendaftarkan diri sebagai peserta partai (Haryanto, 1984:11).

Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut status politik melalui cara-cara konstitusional dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Tujuan umum partai politik adalah, (1) melaksanakan cita-cita nasional Indonesia sebagaimana tertuang di pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945; (2) membuat kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan peningkatan tinggi pada kedaulatan orang-orang

di NKRI; (4) melakukan kesejahteraan untuk semua orang Indonesia.

## **Fungsi dan Tugas Partai**

Secara teori ada hubungan dekat antara upaya untuk mengatur sistem politik yang demokratis menggunakan sistem pemerintah yang kuat dan efektif. Dalam periode transisi politik, pemahaman tentang korelasi antara 2 proses menjadi sangat penting. Karena keterbatasan kapan dan energi, jangan menyusun elemen-elemen sistem politik yang jarang dan pemerintah dilakukan secara terpisah.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

### **☞ Partai sebagai media komunikasi politik**

Salah satu karya partai politik menyalurkan berbagai opini publik dan masukan dan mengatur mereka untuk mengurangi konser pendapat di masyarakat. Selain itu, partai-partai politik memiliki fungsi untuk membahas dan menyebarkan rencana dan kebijakan pemerintah, sehingga ada aliran informasi dan dialog dari bagian atas dan bawah dan bawah, pemerintah dan gubernur, antara pemerintah dan masyarakat.

#### ☞ Partai untuk Pengenalan Politik

Sosialisasi politik ditafsirkan dalam proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi fenomena politik yang umumnya berlaku di warga di mana ia berada. Pengenalan kebijakan terjadi di mana orang mentransmisikan aturan dan nilai henasi ke generasi lain. Kesalahan adalah upaya untuk mendominasi pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus melakukan upaya untuk menerima dukungan penduduk. Di sinilah peran partai politik adalah sarana pengenalan partai politik, justru menerima dukungan dari masyarakat. Sisi lain peran partai politik adalah upaya untuk menciptakan citra yang diperjuangkan oleh partai-partai politik untuk sekretaris publik.

#### ☞ Partai politik sebagai upaya rekrutmen partai politik

Partai-partai politik juga bekerja untuk menemukan dan mengundang orang-orang diberkahi sehingga mereka aktif dalam kegiatan politik untuk menjadi anggota partai-partai (rekrutmen politik). Partai dapat memperluas partisipasi partai politik, yaitu, melalui hubungan pribadi, persuasi dan lainnya. Upaya untuk menarik kelompok muda untuk mendidik menjadi gambar di masa depan akan menjadi kepemimpinan usang (pemilihan pemimpin).

☞ Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat pada orang biasa. Jika konflik terjadi, partai politik mencoba mengatasinya. Dalam kehidupan orang-orang yang lebih luas, di mana banyak minat yang dicampur dengan Baur tidak melahirkan beberapa konflik, semua bentrok untuk mendapatkan kemenangan, di sebelah sederhana dilepaskan oleh pertempuran horizontal di antara oposisi terhadap kebijakan pemerintah terhadap kebijakan pemerintah. Pada titik ini, partai politik harus tampak mediator, sebagai masalah. Ini bekerja sebagai distributor aspirasi komunitas penguasa, dan mengkonfirmasi kesediaan kegagalan politik penduduk (Haryanto, 1984: 11).

Secara empiris ekstensi sebuah partai politik, menurut Ali Syafa'at, bisa dicermati berdasar 3 aspek. Antara lain artinya aspek sosiologis, aspek yuridis dan juga aspek politis (Syafa'at, 2008: 65). Dalam pandangannya, aspek sosiologis tampaknya bersumber dari adanya gerakan-gerakan sosial yang didukung oleh partai sejak berdirinya. Sementara dari sisi yudikatif, Syafa'at mengutip Hans Kelsen yang mengatakan bahwa perpanjangan partai politik bisa eksis secara legal ketika memperoleh status hukumnya sebagai otoritas pengawas. Kemudian pada aspek politik pemekaran partai, ketika ada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan politik khususnya proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan

umum. Dalam demokrasi, jalan utama untuk memasuki ranah politik dan kekuasaan adalah melalui “pintu gerbang” pemilihan umum biasa. Oleh karena itu, keberadaan dan kekuatan partai politik ditentukan secara politik ketika berpartisipasi dalam pemilihan negara yang bersangkutan.

## **Tujuan dan tugas Partai Politik**

Tentu saja, pembentukan partai politik harus memiliki tujuan tertentu. Tujuan partai politik berarti untuk mencapai dan mempertahankan kekuatan untuk menjalankan atau membuat ideologi mereka, dalam bentuk program untuk dikompilasi. Asal mula definisi dan tujuan dan fungsi berasal dari partai politik, dapat dirumuskan secara umum, bahwa tugas-tugas partai politik adalah perantara di antara orang-orang yang menggunakan pemerintah, dan juga sebaliknya. Secara khusus, tugas-tugas partai politik akan dijelaskan di bawah ini.

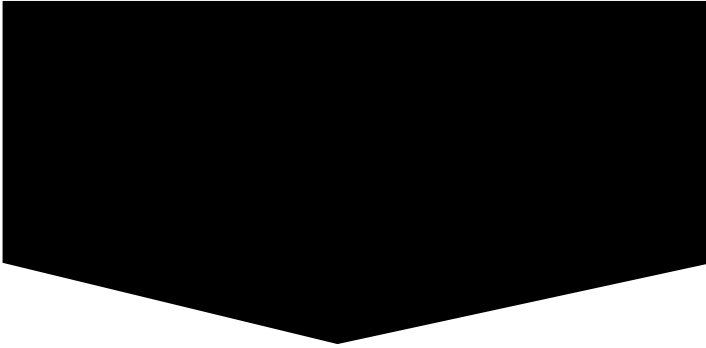
- 1) Undang orang untuk berpartisipasi dalam keputusan politik dan mewujudkan pendapat partai-partai politik sebagai kebijakan bagi semua orang.
- 2) Membuat proses pembuatan pandangan sehingga tidak ada divisi di suatu negara, dan membentuknya sebagai kebijakan bersama yang dapat diterima oleh semua warga.
- 3) Melakukan proses pengiriman aspirasi warga negara di pemerintahan, untuk melaksanakan pemerintah dengan sistem yang lebih baik.

- 4) Melakukan kegiatan rekrutmen, dan pelatihan kandidat akan dinamai nanti sebagai orang yang melayani di kursi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas tugas, partai dijamin atau dilindungi oleh beberapa undang-undang di bawah ini:

1. Batas yang terorganisir dengan bebas.
2. Memberi hak untuk berfungsi sebagai perwakilan dari orang-orang dalam pemilihan umum.
3. Memiliki kebebasan untuk berbicara, berdiskusi dan bertemu.
4. Ada kebebasan untuk menentukan cara bermain, dan dilindungi dari tindakan tindakan diskriminasi.
5. Diberi akses ke tindakan media dan laporan adil.
6. Tanah yang adil dan damai disediakan di antara bagian dengan pihak lain, atau di antara kandidat dengan kandidat lain.





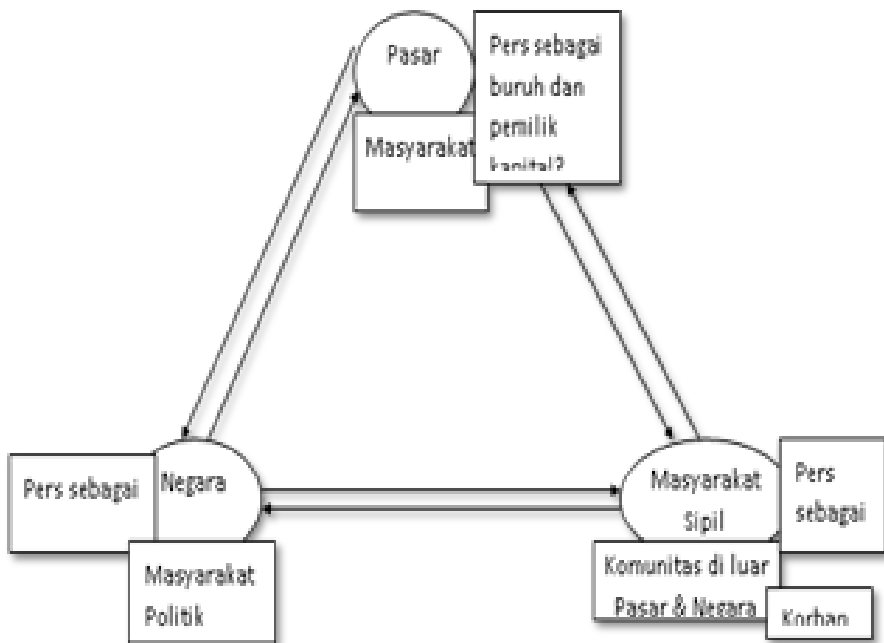
*“Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial”*

*- Thomas Jefferson-*

**B**anyak melupakan makna penting dari media dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan demokrasi. Memang tidak dipungkiri bahwa media saat ini tumbuh menjadi industri yang mampu menelan dana triliunan rupiah per tahun. Secara holistic, adanya kenaikan jumlah media massa harusnya berdampak baik khususnya bagi kebebasan pers sejalan dengan demokratisasi ekonomi serta politik.

Hubungan atau korelasi antara media, pasar dan pemodal, masyarakat atau society dan Negara seperti yang diungkapkan oleh J. Anto dalam kitab yang akan terjadi penelitiannya berjudul: Luka Aceh Duka Pers. Pada buku ini dibahas bagaimana dulu doktrin menjadi slogan : “Pers artinya pilar keempat demokrasi.” Jargon yang mayoritas pada masa

rezim Orde Baru. J. Anto rupanya ingin menggugat dogma tadi dengan sebuah pertanyaan penuh bingung: Apakah kalimat itu mencerminkan visi serta misi kaum Jurnalis? Apakah kalimat itu “mimpi” kaum Jurnalis? Apakah kalimat itu semata-mata adalah slogan pembungkus apa serta siapa jurnalis yang sesungguhnya? Ataupun, memang demikian sudah sosok jurnalis Indonesia ketika ini? Pertanyaan ini pula sempurna buat dijadikan refleksi kita buat melihat media pada meliput proses politik lokal dianggap Pemilihan kepala wilayah pribadi. Sebab menjadi pilar keempat demokrasi, maka selayaknya Bila kaum jurnalis meneguhkan ekistensi atau daulat masyarakat.



Sumber : J. Anto (2002). Luka Aceh Duka Pers

Realisasinya, rakyat justru semakin marjinal posisinya di dalam konstruksi berita yang digarap kaum jurnalis. Dalam kata lain, ironinya, rakyat bukan saja terjepit di ruang-ruang empirik yang diperebutkan oleh fiksi politik, tetapi rakyat jagu tersigkir dari ruang-ruang (visual) media yang dikelola oleh kaum jurnalis yang menyatakan dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Pers justru cenderung untuk menutup ruang publik dan memonopoli-mungkin tepatnya “memperkosakan” ruang media dan kebenaran. Karena itu, media merupakan media pertempuran bagi entitas politik tersebut.

Tujuan mereka adalah untuk mengkonstruksi pandangan publik dengan “kaca mata kuda” mereka dalam melihat realitas dan beropini (J. Anto, 2002: 149). Dalam gambar J. Anto melukis hubungan segitiga antara : Pasar (Pemodal), Negara, Masyarakat sipil. Dalam interaksi ini Pers selalu berhubungan misalnya saja Pers berinteraksi dengan wilayah pasar dan maka pers maka pers akan menjadi pemilik kapital, profit oriented. Jadi berinteraksi dengan wilayah politik maka pers akan menjadi alat propaganda elit politik. Berbeda jika berinteraksi dengan komunitas civil society maka pers menjadi pers jurnalis.

# MEDIA, POLITIK DAN KEKUASAAN

*“Media menggenggam publik luar biasa, katanya sabda lakunya menyerupai mantra”*

*- Najwa Shihab-*

## Media Dalam Pertarungan Politik

*“Words don’t mean, people means”*, begitu kata pengamat komunikasi. Maka, bertentangan dengan harapan pertama ada saat membahas media pada kaitannya menggunakan komunikasi politik adalah bahwa istilah, bahasa politik itu sendiri sudah menjadi sangat politis. Sebuah konsep pada mulanya hanya berarti isi pesan (*content message*) berasal suatu proses komunikasi yang melibatkan komunikator politik (politikus, profesional; dan aktivis; dari kategori dan Nimmo) lambat laun menjadi sesuatu amat terikat kepentingan : ideologi serta bahkan budaya merancang “politik bahasa politik” yang hidup pada masyarakat tadi dalam arti yang luas.

Bahasa merupakan alat satu manifestasi dunia simbolik yang paling mudah dipahami. Karena keistimewaannya juga memungkinkan bahasa menjadi sedemikian praktis dimanipulasi. Adalah bahwa bahasa menjadi instrumen tidaklah bisa netral. Dia menanggung beban kepentingan pada

setiap relasinya menggunakan fenomena. (Dedy Djamaludin Malik, 1998 : 60-61).

Tujuan jurnanisme artinya melaporkan kebenaran. Namun, pada kaitannya dengan media serta bahasa sebagai simbol, tugas ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Banyak ragam kepentingan ikut “berbicara”, pada akhirnya membentuk kebenaran yang disampaikan. Hal tersebut

ada sejak reporter mulai meliput di lapangan, siapa yang jadi objek wawancara, apa pertanyaannya, bagaimana isu diangkat, bagian yang harus dijadikan isu penting serta bagian mana yang diabaikan, sampai waktu redaktur menyunting serta memuat berita. Dengan pilihannya tersebut, pers sudah memposisikan diri di tengah konflik antara pihak berkepentingan serta masyarakat yang menikmati berita. Posisi demikian menjadikan pers memikul beban primer memberikan kebenaran diantaranya, sikap adil tidak memihak. Dengan istilah lain, pers dituntut memberikan kebenaran dengan memberikan pemberitaan obyektif.

*Tujuan jurnanisme adalah melaporkan kebenaran. Namun, dalam kaitannya dengan media dan bahasa sebagai simbol, tugas ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah*

## **Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Kritis**

Paradigma kritis memiliki pandangan lain pada informasi, yang sumbernya tentang bagaimana informasi itu diproduksi serta posisi wartawan serta media dalam holistik proses lahirnya pemberitaan. Paradigma ini mempertanyakan posisi pewarta serta posisi media dalam holistik struktur sosial terdapat dalam rakyat. Dimana posisi itu dapat berpengaruh pada pemberitaan, tidak lagi menjadi cerminan yang sebenarnya. Kelompok orang yang kritis, realitas artinya kenyataan semu sudah terbentuk oleh proses kekuatan sosial, politik serta ekonomi. Sebab itu, mengharapkan empiris apa adanya adalah hal yang tidak mungkin, karena sudah dimasuki pasukan politik dan ekonomi yang secara umum dikuasai.

Berita merupakan akibat perseteruan tentang berbagai kekuatan di masyarakat selalu melibatkan pandangan serta ideologi wartawan atau media. Bagaimana empiris itu dijadikan gosip bergantung dari permasalahan tersebut terjadi, yang umumnya dimenangkan oleh kekuatan yang secara umum dikuasai pada warga. Diskursus atau ihwal dalam pandangan kritis, berdasarkan Michael Foucault artinya bahasa dalam kehidupan konkret, yang disadari atau tak, terkandung pergulatan kepentingan atau pertandingan ideologis. Memandang bahasa sebagai diskursus atau kerangka berpikir berarti memandang bahasa sebagai sesuatu tak netral serta tidak universal. Seluruh diskursus terikat sang ketika, kawasan dan konteks pergulatan politik-historisnya sendiri-sendiri. Foucault melihat diskursus menjadi sesuatu yang pasti bersifat politik.

Kekuasaan terukir sejelas-jelasnya dalam praktik bahasa. karena sebagai kerangka berpikir, bahasa tidak dapat dipisahkan asal kekuasaan politik atau ekonomi, yang sesungguhnya cenderung menyatu. Dalam konteks inilah, bahasa menjadi akibat konflik ihwal yang termanifestasi pada bentuk berita tersaji media yang menjadi fokus kajian paradigma kritis.

## **Media Massa Dan Kekuasaan**

Analisis tentang kritis, keliru satunya, mempertimbangkan elemen kekuasaan pada analisisnya (elemen lainnya merupakan langkah, konteks, histori serta ideologi). Disini, setiap tentang yang timbul dalam bentuk teks, ucapan dan hal lainnya, tidak ditinjau menjadi sesuatu yang alamiah, wajar serta netral tetapi ialah bentuk konflik kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci korelasi antara perihal menggunakan warga. Kekuasaan dalam hubungannya menggunakan ihwal, penting untuk melihat apa yang disebut menjadi kontrol-kontrol disini tidak wajib berbentuk fisik, namun jua kontrol secara mental atau psikis yang kemudian menyebabkan media menyuguhkan empiris semu menjadi manifestasi kontrol.

Dalam tinjauan filsafat, posisi media dengan tanda-tanda hiper-empiris cenderung menjadi manifestasi kekuasaan yang menggunakan, rasio fragmental“, yaitu rasio melihat realitas sebagai potensi buat dimanipulasi, ditundukkan serta dikuasai secara total. Rasio fragmental memandang realitas (alam juga

insan) menjadi obyek buat diklasifikasi, dikonseptualisasi, dan diatur dengan efisien buat tujuan apa pun yang dianggap penting sang kekuasaan.

Media menjadi daerah pertempuran, karena siapapun yang memenangkan pertempuran bisa mendominasi dan mengintervensi. Mochtar W. Oetome percaya bahwa sekarang media telah menjadi "pasir konversi publik". Dengan kekuatan teknologi mediasi, hampir semua bentuk penting dari percakapan sosial politik dan distribusi oleh media. Media kemudian sebagai identifikasi, pembaca, penerjemah dan distribusi empiris.

Dalam pandangan Yasraf Amir Piliang ini, fenomena di mana media hanya menjadi instrumen energi, yang menyebabkan media yang akan sering dituduh tidak menjadi lebih berasal oleh aparat hegemonik (hegemonik aparat) Sebuah sistem tenaga, ketika menyampaikan informasi sinkron menggunakan kekuasaan. minat. Dalam hal ini, media tidak lagi lagi sebagai perpanjangan dari sistem energi hegemonik, corong untuk memperluas ide-ide ideologis lebih didominasi.

Definisi kekuasaan dari Max Weber artinya kemungkinan seseorang aktor pada antar hubungan sosial akan berada di suatu posisi buat menjalankan keinginannya sendiri, meski ada perlawanan, tanpa menghiraukan landasan tempat meletakkan kemungkinan itu. Sedangkan wewenang / otoritas (authority) merupakan sesuatu yang mungkin buat memerintah, menggunakan suatu keikhlasan tertentu dipatuhi sekelompok orang eksklusif. Disparitas antara kekuasaan serta otoritas terletak di kenyataan, kekuasaan intinya berafiliasi



menggunakan kepribadian individual, sedangkan otoritas selalu bekerjasama dengan posisi atau peran sosial seorang.

Satu-satunya alternatif buat membedakannya, istilah dahrendorf bahwa kekuasaan adalah korelasi faktual semata, sedangkan otoritas ialah korelasi dominasi dan penundukan (*subjunction*) yang sah. Sedangkan Johan Galtung merumuskan kekuasaan (*power*) menjadi cenderung menaruh agama pada kekuasaan (*force*), sedangkan otoritas artinya kekuasaan dilegitimasi, telah menerima pengakuan umum, Ia menekankan pentingnya rekanan menjadi prasyarat terjadinya kekuasaan. Selama belum ada relasi, kata Galtung, kekuasaan belum terjadi. Sebab, setiap rekanan hubungan adalah saluran kekuasaan mengalir asal pemberi pada penerima. Relasi yang tidak seimbang artinya cara memperoleh kekuasaan atas orang lain (*power of other*). Implikasinya, terdapat pihak bertenaga serta lemah. Sebab itu, kekuasaan hanya bisa dibangun pada suatu relasi sosial tidak seimbang, eksploitatif dan represif.

Galtung menciptakan konsep kekuasaan bertolak dari 2 prinsip dasar pada kehidupan manusia, yakni ada (*being*) serta mempunyai (*having*). Kekuasaan yang terjadi pada rekanan tidak seimbang ialah dampak perbedaan segi being, dan having, serta kedudukan (*position*) pada struktur sosial. Kekuasaan yang didapatkan sebab keturunan sejak lahir yang kaitannya dengan dimensi 'ada' disebut '*being power*'. Kekuasaan yang asal dari memiliki sumber-asal kemakmuran disebut *having power*.

Sedangkan kekuasaan karena 'kedudukan' pada suatu struktur diklaim '*structure power*'. La menggabungkan dimensi ada serta mempunyai dengan sebutan resource power (kekuasaan sumber) yang memiliki perspektif orientasi pelaku. Sedangkan dimensi 'kedudukan' diklaim kekuasaan struktural, sebab didekati asal orientasi struktur.

Galtung juga mengakui keterlibatan unsur langsung, misalnya kharisma, dapat turut membentuk kekuasaan struktural. Kekuasaan asal dan struktur terkait erat serta saling menentukan. Semakin besar kekuasaan asal, semakin luas pula kemungkinannya memiliki kekuasaan struktural, sebab kekuasaan sumber mampu mengantarkan ke posisi kekuasaan struktural.

Tindakan kekerasan dan kekuasaan, dari Galtung, terkait erat. Kekerasan personal (langsung) terjadi dampak penggunaan kekuasaan asal. Sedangkan kekerasan struktural sesuai kekuasaan struktural. Pada pengertian sempit, kekerasan dimaknai agresi atau pelecehan fisik seseorang atau hewan; Serangan, kehancuran, vandalisme yang sangat sulit, kasar, kejam dan ganas untuk sesuatu yang berpotensi dimungkinkan sebagai pribadi. Tetapi Galtung menolak pendefinisian secara sempit, hanya berarti penghancuran secara somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan penghilangan nyawa sebagai bentuk ekstremnya seseorang pelaku memang sengaja melakukannya.

Galtung lebih menekankan di segi dampak suatu tindakan terhadap manusia. Sebab, dari sudut korban, kekerasan tidak beragam bedanya apakah mati kelaparan dampak agresi militer yang berlarut-larut atau akibat ketidakadilan, ketidakmerataan dan atau struktur vertikal asimetris. Pula tidak terdapat bedanya; menggunakan seorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau meninggal pelan-pelan sebab kekurangan makan.

Pengertian diberikan Galtung jauh lebih luas menggunakan berpijak di hak asasi manusia, yakni setiap individu atau langsung mempunyai hak merealisasikan diri (*self realization*) serta hak berbagi diri (*personal growth*). Ke 2 hak tadi tidak dapat dicabut atau dihilangkan sang siapa pun. Kekerasan, kata Galtung, sebab jika insan ditentukan sedemikian rupa sebagai akibatnya realisasi jasmani serta mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.

Tulisan ini, memfokuskan pada perbedaan kekerasan fisik dan psikologis sebagaimana dikemukakan Galtung. Namun buat lebih mempertegas secara konseptual, istilah kekerasan simbolik digunakan buat menyebut kekerasan psikologis, sebab istilah kekerasan psikologis yang dipakai Galtung tidak secara eksplisit menunjuk pada upaya mereduksi realisasi mental aktual melalui penggunaan bahasa. Sedangkan kekerasan simbolik disini dimaknai menjadi tindakan memanipulasi kabar melalui bahasa (wacana) oleh penguasa (kepemimpinan intelektual dan moral) demi mempertahankan kekuasaan serta menaklukkan kemampuan berpikir kritis warga secara sukarela.

Kekerasan simbolik berarti lebih banyak wacana (wacana) kekerasan adalah kegiatan intelektual untuk kondisi jika pihak lain berpikir sebagai hasilnya, beberapa jenis kekerasan adalah legal dan bahkan perlu. Hampir semua jenis kekerasan ini adalah kekerasan struktural. Karena dia bekerja pada tingkat pemikiran, korban tidak merasa bahwa dia dalam kekerasan sehingga kekerasan (fisik / psikologis) menjadi legal dan diterima secara sukarela, bahkan korban melakukan kekerasan atas dirinya sendiri secara sukarela, serta reproduksi. Tujuan dari kekerasan simbolik berarti definisi dan konsep lingkungan interaksi antara manusia, seperti demokrasi, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, dll.

Dalam perspektif ihwal, *words don't mean people mean*. Satu istilah mampu mempunyai beribu makna tergantung siapa memaknainya: setiap orang kreatif sendiri-sendiri tergantung di gagasan, dan segala kepentingannya demi kemandirian dirinya. Barang siapa selalu semangat mengalahkan kepentingan lainnya. Inilah yang disebut politik. Dengan prosedur semacam itu, kekerasan wacana hampir absolut dilakukan kelompok intelektual pada pada negara (pejabat, birokrasi, militer), maupun di luar negara (akademisi, aktivis politik, partai politik, elite sosial dan lainnya).

Media massa menempati posisi sangat krusial pada perantara transformasi kekerasan tentang antar aktor pada warga serta negara, bahkan terbuka peluang menjadi aktor pelaku kekerasan itu sendiri. Melalui media, manusia memperoleh berita serta menghasilkan citra ihwal lingkungannya berdasarkan apa yang digambarkan sang media.

Mirip yang dikatakan rahmat, kita membentuk gambaran tentang lingkungan sosial didasari realitas diperlihatkan oleh media massa sedang realitas yang disajikan media ialah empiris yang sudah diseleksi, realitas tangan kedua (*second hand reality*). Serta publik menerimanya sebagai sebuah empiris, meski sadar atau tidak sudah mengalami perubahan asal empiris direpresentasikan.

Hal ini ialah dampak atau pengaruh dari media massa. Hal ini sejalan menggunakan apa yang dinamakan fungsi agenda media atau lazim disebut rencana setting. Berdasarkan Jalaluddin Rakhmat, teori agenda setting dimulai dengan asumsi bahwa media massa menyaring info, artikel atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, pelaku proses selektif, pelaku proses seleksi info (isu) media massa (*gatekeepers*) mirip penyunting, redaksi bahkan wartawan sendiri memilih mana hal pantas diberitakan dan mana harus disembunyikan.

Dampak media massa ini dapat dipandang melalui satu teori, yaitu teori rencana setting. Teori ini beropini bahwa media massa memang tidak memilih apa yang dipikirkan orang (*what to thing*), tetapi mempengaruhi apa yang penting atau bagaimana harusnya orang memikirkan sesuatu (*what to thing about*). Media, melalui fungsi agenda setting-nya bisa buat menyebabkan perubahan kognitif diantara individu-individu untuk menstruktur pemikiran mereka.

Ringkasnya media massa kemungkinan tidak berhasil memberitahukan kepada kita bagaimana berpikir, namun media secara mengagumkan berhasil memberitahukan kepada kita bagaimana memikirkan sesuatu. Teori rencana konfigurasi

ini mulai menggunakan asumsi bahwa media massa menyaring masalah, artikel atau penulisan yang akan ditransmisikan. Secara selektif, "gateameters", sebagai editor, editor, bahkan jurnalis, menentukan mana yang pantas mereka laporkan dan bahwa mereka harus disembunyikan. Fungsi ini pula diuraikan sang Donald Show serta Maxwell Mccombs sebagaimana dikutip Stephen W. Littlejohn disebutkan sebagai berikut :

*(...terbukti bahwa para Editor dan emiten memainkan peran penting dalam konfigurasi realitas sosial, seperti ketika mereka melakukan tugas sehari-hari untuk memilih dan menyoroti berita ..... Dampak media massa kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif diantara individu-individu untuk menstruktur pemikiran mereka telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting komunikasi massa. Disinilah terdapat efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita... ).*

Ana Nadya Abrar, jua menggunakan memakai agenda *setting theory* menyimpulkan bahwa pers memiliki kekuatan besar buat mengarahkan persepsi serta perhatian warga terhadap realitas sosial. Sadar atau tidak sadar, pers mampu memanipulasi atmosfir politik buat mencapai tujuan eksklusif. Jurnalistik di dasarnya adalah aktivitas menghasilkan isu yang melalui bahasa. Ia mengumpulkan berita, mengolahnnya dan menyajikannya pada bentuk info bersaranakan bahasa. Tetapi bahasa tak dapat ditinjau semata menjadi alat komunikasi atau sebuah sistem kode atau nilai yang secara sewenang- wenang menunjuk suatu empiris monolitik.

Bahasa ini berarti kegiatan sosial, dan bukan sesuatu yang netral dan koheren, tetapi peserta dalam proses pengetahuan, budaya dan politik. Bahasa bukanlah sesuatu yang transparan, menangkap dan mencerminkan semuanya dengan jelas. Secara sosial, bahasa tersebut berkewajiban, dibangun dan direkonstruksi dalam persyaratan spesifik dan lingkungan sosial eksklusif, dan tidak diatur sesuai dengan hukum yang diatur secara ilmiah dan universal. Oleh karena itu, sebagai representasi dari hubungan sosial tertentu, bahasa selalu membentuk tema, taktik dan tema Scursus atau Scursus Diskursus. Wacana bukan hanya indera reproduksi untuk menyuarakan pulang gagasan, melainkan pula dapat membentuk gagasan serta pedoman kegiatan mental individu yang adalah dasar empiris diciptakan.

Althusser ingin memberikan bukti proses dominasi dan penaklukan untuk kekuatan negara tidak hanya melalui kekerasan fisik, dalam istilah Althusser, aparaturnegara yang

represif, juga melalui produksi dan reproduksi daya dalam ruang budaya (persepsi daerah dan maknanya kehidupan. Anda suka dalam beberapa teks dan saling bersaing).

Althusser menyebutnya *ideological state apparatus*. Negara tidak hanya bisa mengandalkan kekuasaan serta kekerasan buat mendapatkan ketundukan dan kepatuhan para warganya, karena ia segera berubah sebagai forum otoriter bahkan totaliter. Bila kekerasan fisik dipergunakan buat memaksakan keinginannya di berbagai bidang. Buat itu dibutuhkan legitimasi maksudnya adanya alasan bisa diterima serta dipercayai para masyarakat ihwal mereka wajib tunduk serta patuh diwewenang negara-contohnya, pemerintah mengatur mereka atas nama negara itu adalah pemerintah yang dipilih melalui pemilihan, atau pemerintah transisi tidak dapat dipilih melalui pemilihan terbukti membela kepentingan mereka dan membuat aspirasi mereka menjadi kenyataan.

Althusser berkata, ada dua dimensi dari sifat negara, yaitu, represif dan ideologis yang mulai berlaku, sementara yang lain masuk dengan konservasi. Konsep peralatan represif negara (RSA) dan aparatur ideologis Negara (ISA) diajukan. Dua perangkat berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, yang terdiri dari penindasan melanggengkan hubungan produksi masyarakat. Pekerjaan RSA secara fisik menindas untuk memastikan persyaratan politik yang dihasilkan oleh ISA (melalui manipulasi pencahayaan komunitas intelektual, budaya dan simbolik). Penindasan RSA ini kemudian diberi makna ideologis ISA menggunakan kerangka legitimasi terhadap saham RSA Recompra, sebagai hasil dari masyarakat



untuk menerima fakta-fakta kekerasan. Bagi Althusser, RSA identik dengan menggunakan sistem dan struktur negara sendiri untuk menjadi cabang kekuatan hukum dan eksplisit. Hal ini memungkinkan RSA validitas untuk mencapai masyarakat yang lebih luas, dan motilitas kehidupan adalah politik.

Teori Althusser perihal ideologi menekankan bagaimana kekuasaan grup yang lebih banyak didominasi pada mengontrol kelompok lain. Antonio Gramsci membentuk sebuah teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok didominasi dalam proses diam, tanpa bertindak kekerasan. Media menjadi sarana di mana kelompok dikonfirmasi posisi dan terdegradasi gerombolan lain. Ini bukan rasa media adalah kekuatan jahat (sengaja) menurunkan orang terendah.

Proses bagaimana dengan ilustrasi penduduk yang lebih rendah bisa buruk di media, akan berlangsung dalam proses yang kompleks. Proses marginalisasi di mana ia dilakukan secara alami, seperti, dan hidup bersama. masyarakat tidak merasa tertipu atau dimanipulasi oleh media. Konsep intervensi membantu mengungkapkan bagaimana proses ini dilakukan. Konsep dipopulerkan filsafat politik ahli hegemoni Italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari kendaraan dan produksi hubungan ekonomi, tetapi juga kekuatan (force) dan hegemoni.

Setelah konsep Antonio Gramsci, hegemoni yaitu, kontrol atas karya ketika ada *consensus* umum, yaitu, ketika orang-orang atau sebagian besar dari mereka setuju dengan pengendalian dampak dan pengambilan keputusan dari beberapa orang yang disebut Elite Power. Anggota pengaruh elit penguasa dan mengendalikan dukungan *power control*. Penguasa elit media kemudian dikonsumsi, kanan, keuangan, pendidikan, sumber budaya dan kemudian memenangkan konsensus opini publik (konsep hegemoni membantu kita untuk menyebutkan bagaimana proses ini dilakukan).

Jika penggunaan pertama dari energi untuk menghasilkan banyak orang mengikuti dan memenuhi persyaratan metode produksi eksklusif paksa atau nilai-nilai, bagian terakhir meliputi pengembangan dan pemeliharaan 'kepatuhan aktif' dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa melalui penggunaan intelektual, kepemimpinan moral dan politik. Hegemoni menekankan bentuk realisasi diri, bentuk aplikasi, mekanisme dijalankan untuk mempertahankan, dan melakukannya melalui kepatuhan para korban, sebagai hasil dari upaya itu berhasil. Apa menyarankan dan melatih pikiran mereka. proses ini dilakukan dan dapat menyerap dan memainkan peran dalam interpretasi dari pengalaman realitas wacana. karya Intervensi melalui konsensus dan bukan upaya untuk menekan kelompok terhadap kelompok lainnya.

Beberapa alat kekuasaan hegemoni bagaimana membentuk cara berpikir atau lebih dan lebih didominasi disebut valid, sementara sekitar kejahatan ini diklaim. Ada nilai atau konsensus dengan sia-sia yang disebut valid, jadi waktu bukan perspektif atau yang lain sehubungan dengan pretensi menjadi salah. Media di sini secara tidak sengaja dapat menjadi alat untuk mengetahui bagaimana mereka didistribusikan dan tenggelam dalam pikiran audiens sebagai hasilnya sebagai konsensus berita atau sehubungan dengan nilai-nilai yang dianggap paling dominan. Ada nilai atau orang lain tentang dilihat sebagai streaming.

Intervensi, esensinya adalah represi kekuasaan. Perbedaannya 'lunak' daripada sarana represi atau 'lunak' ketika mengandalkan kepemimpinan moral dan intelektual (arah intelektual dan moral) dan aktif. Intervensi tidak dicapai melalui kekuatan koersif, tetapi wacana sistemik (bahasa), diarahkan dan berkelanjutan untuk mendapatkan penerimaan publik secara sukarela akan menjadi ide atau rezim. Wacana politik yang penting memainkan pawai dalam meletakkan dasar-dasar intervensi.

Untuk upaya untuk menciptakan kepatuhan warga melalui intervensi, tidak hanya penggunaan cara di bagian yang terkendali harus memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai dan standar pihak berwenang, tetapi lebih dari itu, mereka juga diharuskan untuk memberikan subkordinasi persetujuan Anda. Dengan ini, ini dimaksudkan untuk menggunakan hegemoni atau utama dengan kepemimpinan moral dan intelektual dalam konsensus (aktif). Ini juga membedakan konsep Althusser.

Upaya untuk mendominasi isi pikiran, termasuk cara berpikir melalui monopoli makna manipulasi, dapatkan menggunakan ekspansi produk dari struktur kognitif dan efektif, di mana orang merasakan dan mengevaluasi masalah realitas sosial.

*“Jika saya diberi kesempatan untuk menentukan apakah kita harus memiliki pemerintahan tanpa media atau media tanpa pemerintahan, aku tidak akan ragu untuk memilih pilihan yang terakhir”*

*- Thomas Jefferson-*



# FRAMING, FRAME AGENDA SETTING MEDIA MASSA

*“Orang-orang akan percaya apa yang media katakan kepada mereka bahwa mereka percaya”*

*- George Orwell-*

## **Memahami Framing**

Pihak atau faktor yang secara umum dikuasai mensugesti media tersebutlah yang akan mendominasi ihwal pada media. Hal tadi akan tercermin dalam kebijakan redaksional atau sikap politik yang ditampilkan media (politik media) dalam memberitakan suatu empiris atau berita tertentu. Primer menganalogikan politik fakta sebagai seuntai nilai-nilai membentuk visi atau suatu kerangka pandangan dijadikan acuan bagaimana wartawan melihat suatu insiden, menyampaikan makna atau meletakkan tekanan di kejadian tersebut. Jadi sikap politik media disini adalah kerangka pandangan atau frame media pada mengemas informasi.

Mc Combs menyimpulkan bahwa media dapat menghipnotis cara kita memandang sesuatu, yaitu melalui proses priming dan framing. Priming ialah proses psikologis dimana media menekankan pada isu-info eksklusif, tidak hanya

menambah pemfokusan pada isu-berita tersebut, tetapi juga mengaktifkan informasi-informasi diperoleh terdahulu tentang isu-gosip tadi pada memori orang yang bersangkutan.

Framing artinya pemfokusan di satu atau beberapa aspek asal empiris, mengaburkan elemen-elemen yang lain. Tindakan itu bisa membuat audiens memiliki reaksi yang berbeda. Menurut Mc Combs kiprah media pada framing berita-informasi bagi publik bisa dicermati berasal 2 dimensi tidak sama. Pertama, berkaitan menggunakan transmisi media atas informasi-info eksklusif dan yang kedua mengenai bagaimana media framing membangun makna (Griffin, 2000: 383-384).

Konsep bingkai sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari media empiris. Bingkai dapat ditinjau dalam penempatan informasi dalam konteks yang berbeda sehingga masalah tertentu memperoleh tugas yang lebih besar daripada informasi lainnya. Robert M. Masukkan lebih lanjut mendefinisikan bingkai sebagai "Seleksi berasal dari beberapa jenis aspek empiris yang diterima dan membentuk insiden yang paling menonjol dalam teks komunikasi, dalam beberapa cara itu berarti mengkhhususkan diri definisi, interpretasi karena dampak, moral Penawaran penilaian dan likuidasi sebagai dilema dijelaskan "(Nugroho et al, 1999: 20)

Masukkan melihat membingkai dua dimensi akbar: pemilihan dan masalah empiris atau masalah tonjolan. Tonjolan adalah proses pembuatan informasi menjadi lebih signifikan, lebih menarik, signifikan atau lebih diingat oleh publik. Secara empiris disajikan secara mencolok atau

mengejutkan, itu lebih mungkin dipertimbangkan dan disarankan kepada audiens untuk memahami empiris.

Praktik struktur diarahkan oleh media dengan memilih masalah tertentu dan mengabaikan berita lain: dan menyoroti aspek-aspek desas-desus yang menggunakan beberapa taktik sehubungan dengan fitting mogok (posisi di tajuk utama, penggulingan, grafik, pengulangan, grafik gunakan untuk mendukung dan memperkuat ekstrusi. , Penggunaan label tertentu dengan menggambarkan orang atau peristiwa dilaporkan, asosiasi pada simbol budaya, generalisasi, penyederhanaan dan lainnya. Seluruh aspek itu digunakan buat menghasilkan dimensi tertentu berasal kontruksi berita menjadi bermakna dan diingat sang khalayak (Nugroho dkk, 1999: 21).

Secara teknis, mustahil bagi seorang jurnalis untuk membongkai semua bagian berita. Artinya, hanya sebagian dari peristiwa (peristiwa) yang penting dalam gosip yang merupakan objek pembungkahan jurnalis. Namun, bagian-bagian dari peristiwa penting ini sendiri adalah aspek yang benar-benar ingin diketahui publik. Aspek lain adalah insiden atau wangsit yang dilaporkan.

Berdasarkan, framing dalam gosip dilakukan dalam empat cara, yaitu, pertama, dalam identifikasi kasus duduk (identifikasi kasus duduk), yaitu peristiwa apa yang ditinjau dalam apa dan dengan nilai positif atau negatif; Kedua, dalam identifikasi interpretasi kausal, yang dianggap sebagai penyebab masalah; Ketiga, yaitu penilaian moral yang dievaluasi, yaitu evaluasi penyebab dilema; Dan keempat, saran

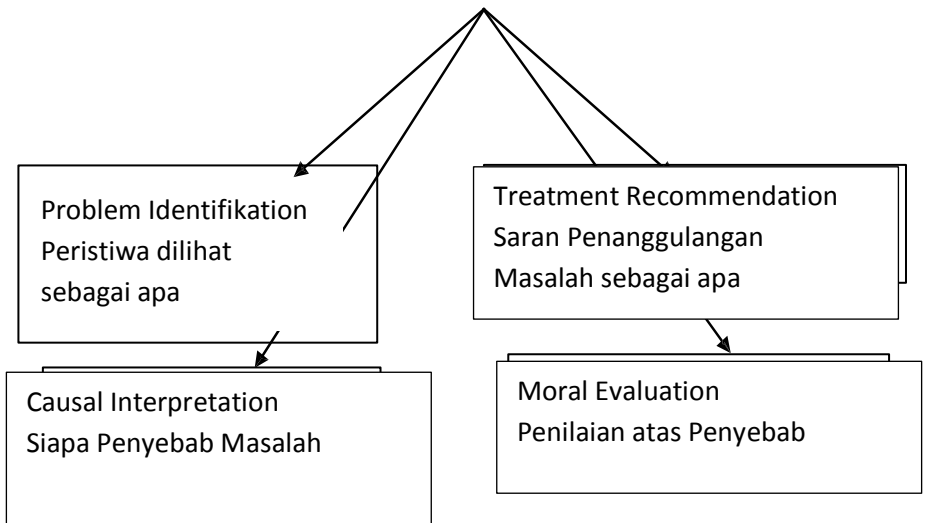
rekomendasi perawatan, yang menawarkan cara untuk menangani dilema dan, kadang-kadang, memprediksi hasilnya. (Sobur, 2001: 172-173).

Sedangkan model framing Menurut Gamson dan Modigliani berdasarkan pendekatan konstruksionis yang melihat representasi berita dan artikel, yang terdiri dari paket interpretatif yang mengandung konstruksi signifikansi eksklusif. Dalam paket ini ada dua struktur, yaitu bingkai inti dan simbol kondensasi. Struktur pertama adalah pusat organisasi elemen Wangsit yang membantu komunikator menunjukkan substansi informasi yang sedang dibahas, struktur kedua berisi dua struktur, yaitu perangkat pembedaan dan perangkat penalaran. Bingkai adalah nukleus dari unit besar sehubungan dengan paket publik yang dipertimbangkan.



Tabel 1

Skema Framing Robert Entman  
Teknik Framing



Framing analysis dikembangkan Gamson dan Modigliani, memahami pertanyaan media sebagai paket interpretatif ketika dibangun dan memberikan arti informasi (SOBUR, 2001: 176-177).

Bingkai dasar (ide-ide sentral). Titik ini berisi elemen sentral untuk memberikan pemahaman yang relevan tentang kejadian itu, dan mengarahkan makna informasi untuk membangun simbol kondensasi (simbol "", yang digunakan"). Simbol kondensasi rata-rata karena kenajisan dalam interaksi

perangkat simbolik (perangkat pembingkaiian dan perangkat penalaran) sebagai dasar untuk penggunaan perspektif (SOBE 2001: 178).

Detail bisa dipandang di Penampang 1-3.

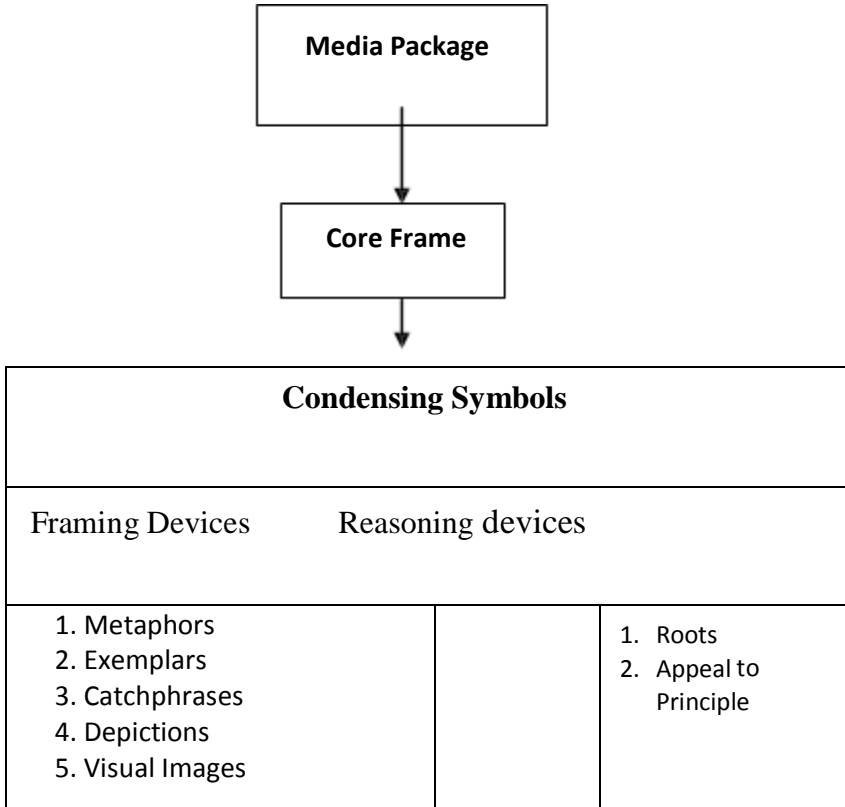
Dalam hal dugaan kampanye walikota, dapat diselenggarakan dalam suatu paket (paket media) yang pada dasarnya dibentuk oleh apa yang dianggap kerangka kerja, atau ide-ide organisasi pusat melalui koherensi sarana dalam realisasi beberapa opsi, tonjolan dan penghindaran simbol bahasa atau konsep eksklusif.

Seperti yang disebutkan pada awalnya, bingkai terdiri dari perangkat pembingkaiian yang bekerja untuk mengarahkan apa yang "sebenarnya" dalam informasi di balik serangkaian fakta, dan perangkat penalaran memainkan peran panduan tekad dan tindakan.

Masalah dugaan kampanye ditutupi oleh kandidat bagi walikota, kita dapat menemukan perangkat pembingkaiian (yang mengarahkan cara melihat gosip) sarana melalui penggunaan berbagai jenis metafora, visualisasi.

Ini sejalan dengan empat fungsi frame seperti yang mereka katakan. Keempat fungsi bingkai: pertama, mendefinisikan masalah (identifikasi kasus duduk) memutuskan apa yang dilakukan agen kausal, gunakan Oporto dan keuntungan apa yang umumnya diukur dengan nilai budaya bersama.

Tabel  
Framing Analysis  
Model Gamson dan Modigliani



Ke 2, mendiagnosis penyebab (causal interpretation) – mengidentifikasi kekuatan membentuk dilema. Ketiga, melakukan evaluasi moral (moral evaluation) – mengevaluasi agen-agen kausal dan dampak-dampaknya. Keempat,

menyarankan perbaikannya (treatment recommendation) – memperlihatkan serta menyampaikan pembenaran terhadap penanganan persoalan, serta memprediksi kemungkinan akibatnya (sobur, 2001:182).

Pada dasarnya, bingkai adalah cara mengamati bagaimana media menceritakan sebuah peristiwa. Cara bercerita diilustrasikan dengan "cara melihat" sebagai pengalaman penggunaan informasi. "Metode pengamatan" ini berdampak pada apa yang akan terjadi ketika konstruksi pengalaman berakhir. Analisis bingkai mengacu pada analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis bingkai juga digunakan untuk melihat bagaimana media memahami dan membingkai peristiwa. Setiap hari kita akan menyaksikan dan membaca bagaimana media melaporkan kejadian yang sama secara berbeda. Kerangka sebelumnya memiliki dua esensi utama. Pertama, bagaimana menjelaskan peristiwa tersebut. Ini melibatkan bagian mana yang tertutup dan bagian mana yang tidak. Kedua, bagaimana berita itu ditulis. Gunakan terminologi, kalimat, dan gambar bersama-sama untuk mendukung gagasan dalam hal ini. Kerangka tersebut melihat bagaimana media menyusun pesan atau peristiwa.

Bingkai itu akhirnya ditentukan bagaimana cara menyajikan kenyataan kepada pembaca. Mirip dengan Edelman mengatakan, apa yang kita ketahui tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana Anda melakukan kerangka acara tersebut memberikan beberapa pengertian dan makna suatu peristiwa.

Sebuah perang dapat didefinisikan sebagai “tindakan pahlawan”, “aneksasi” bahkan “tindakan konyol”, kesemuanya tergantung pada bagaimana kita memandang realitas tadi. Hal ini mengakibatkan realitas yang terkonstruksi tersebut bias jadi berubah secara radikal dibandingkan dengan empiris yang sesungguhnya. Hal ini karena framing memilih bagaimana realitas itu harus ditinjau, dianalisis serta diklasifikasikan pada kategori tertentu (nugroho, 1999:22).

## **Framing dalam Paradigma Konstruktif**

Frame termasuk dalam paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memiliki sudut pandang dan opini tersendiri terhadap media dan teks-teks bermasalah yang dihasilkannya. Dari Berger, empirisme tidak diusulkan oleh sains, juga bukan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Di sisi lain, informasi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini, empirisme bersifat plural. Laporan berita rakyat memiliki struktur berdasarkan realitas (Eriyanto, 2002:15).

Dalam konstruksi berita, gosip bukanlah peristiwa atau informasi dalam arti yang sebenarnya. Di sini, empirisme tidak hanya diteruskan ke informasi. Gosip adalah produk interaksi antara reporter dan fakta. Selama proses internalisasi, reporter dipukul oleh kaum empiris. Laporan empiris reporter berfokus pada pencerahan reporter. Selama proses eksternalisasi, reporter berinvestasi dalam pengalaman untuk menjelaskan.

Ide mengungkapkan informasi adalah untuk melihat kenyataan. Hasil dari bahan berita merupakan produk dari proses interaksi serta informasi dialektika tersebut.

Pendekatan konstruksionis memiliki penilai berita sendiri bagaimana media serta isu, wartawan serta isu dipandang. Penilai berita tadi akan dijelaskan satu persatu di bawah ini (Eriyanto, 2002: 19-35).

Pertama, deskripsi/peristiwa berarti hasil konstruksi. Untuk konstruktivis, empirisme adalah subjektif. Realitas itu ada karena dihadirkan oleh konsep subyektif reporter. Realitas diciptakan melalui konstruksi, yang merupakan pandangan eksklusif reporter. Tidak ada realitas objektif di sini, karena pengalaman diciptakan melalui perspektif yang konstruktif dan eksklusif. Kenyataannya mungkin berbeda, tergantung bagaimana wartawan dengan perspektif yang berbeda memahami konsep pengalaman. Dalam konsep positivis isu ini, diasumsikan adanya realitas “eksternal” yang ada sebelum reporter melaporkannya. Oleh karena itu, ada realitas objektif yang harus diterima dan diberitakan oleh wartawan. Pandangan ini sangat kontras dengan pandangan konstruktivis. Berita atau bukti bukan semata-mata sesuatu yang diperoleh, ada, dan dijadikan bahan dari berita. Fakta atau kenyataan pada dasarnya dikonstruksi.

Kedua, sarana informasi adalah agen konstruksi. Tampilan konstruksi memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan positivis dalam evaluasi media. Dalam pandangan positivis, diamati bahwa media adalah saluran. Media adalah kendaraan bagaimana pesan komunikator didistribusikan kepada

penerima (audiens). Media di sini murni menjadi saluran, di mana transaksi pesan asalkan semua pihak terlibat dalam gosip. Sudut pandang seperti itu, tentu saja, melihat media tidak menjadi agen, tetapi hanya saluran. Media ditinjau sebagai media netral.

Menurut pendapat konstruktif, media terlihat kebalikannya. Media bukan hanya saluran gratis, tetapi subjek membangun empiris, penggunaan penuh, bias, dan masalah yang mengkhawatirkan. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan secara empiris. Jenis penglihatan ini menolak argumen yang ditunjukkan oleh media seolah-olah itu menjadi area saluran gratis. Masalah yang kita baca tidak hanya menggambarkan kenyataan, tidak hanya menjelaskan pendapat subjek, tetapi juga pembangunan media. Melalui banyak instrumen yang mereka miliki, media membantu kenyataan dalam berita.

Ketiga, informasi bukanlah refleksi asli pada kenyataannya, itu hanya pembangunan empiris. Dalam pandangan positivis, masalahnya adalah info. Berita itu disajikan kepada hadirin untuk menjadi representasi realitas. Fakta ditulis ulang dan ditransformasikan melalui berita. Tetapi dalam pandangan pembangunan subjek itu seperti sebuah drama. Masalahnya tidak menggambarkan kenyataan, tetapi hanya potret yang berasal dari arena feud di antara beberapa pihak yang berkaitan dengan insiden tersebut. Untuk pendapat positivis, informasi adalah refleksi dan refleksi yang berasal dari empiris. Informasi yang berarti cermin kenyataan, oleh karena

itu, gosip harus mencerminkan secara empiris untuk menginformasikan. Pendapat ini ditolak oleh para konstruksi.

Atas dasar konstruksi, berita adalah asal dari pembangunan Sosberite, di mana ia selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai jurnalis atau media. Bagaimana realitas digunakan, karena berita itu tergantung pada bagaimana berita dipahami dan ditafsirkan. Proses makna selalu menyiratkan nilai-nilai tertentu sehingga tidak mungkin untuk gosip adalah cerminan dari asal realitas. Bias empiris yang sama, jadi dia memperhatikan tidak selaras, karena ada cara untuk melihat yang tidak sinkron.

Perbedaan antara kenyataan dan berita tidak dianggap salah, tetapi diterima begitu saja. Perbedaan positivisme dan konstruktivisme dalam memahami berita menyebabkan perbedaan cara menilai karya jurnalis. Karena diasumsikan adanya realitas objektif, kabar baik harus mencerminkan realitas itu. Dalam konsep konstruktivisme, situasinya berbeda.

Masalah tidak mewakili kenyataan. Berita yang kita baca pada hakikatnya adalah hasil konstruksi kerja berita, bukan aturan baku berita. Semua proses konstruksi (mulai dari pemilihan berita, sumber, penggunaan terminologi, gambar hingga editing) membantu menghadirkan realitas ini kepada publik.

Keempat, gosip merupakan konstruksi subjektif/realitas. Pandangan konstruktivis tentang evaluasi objektivitas berita

*Bagaimana realitas  
itu dijadikan berita  
sangat tergantung  
pada bagaimana  
fakta itu dipahami  
dan dimaknai*



kacau balau. Anda tidak dapat menggunakan kriteria ketat seperti positivis untuk menilai apa yang terjadi dalam jurnalisme. Ini karena masalahnya adalah produk dari konstruksi dan makna pengalaman. Penafsiran seseorang tentang realitas mungkin tidak sinkron dengan orang lain, yang tentu saja juga akan menimbulkan "pengalaman" yang berbeda. Oleh karena itu, ukuran standar dan standar tidak dapat digunakan. Jika sebenarnya ada perbedaan penggunaan gosip, itu tidak disebut kesalahan, tetapi memang mirip dengan maknanya dengan kenyataan.

Masalahnya di sini bukanlah prasangka, mirip dengan pendekatan positivis. Dalam pendekatan positivis, fokusnya adalah pada prasangka. Dengan kata lain, prasangka dianggap sebagai kesalahan, dan jurnalis memiliki kewajiban untuk menghindari prasangka. Dalam tradisi penelitian positivis, analisis bertujuan untuk mengetahui apakah ada bias dengan memeriksa sumber informasi, narasumber, dan sumber tulisan. Jika ada kesalahan atau prasangka, penjelasan biasanya ditekankan dengan mencari kemungkinan sumber kesalahan: waktu pelapor terbatas, ruang terbatas, kesalahan pelapor, dll. Hal ini tidak sejalan dengan pendekatan konstruktivis. Kedudukan sumber gosip yang menonjol dibandingkan dengan sumber lain; wawancara dengan tokoh yang lebih besar yang ditempatkan dari tokoh lain; pemberitaan yang hanya sepihak dan tidak menguntungkan pihak lain; tidak seimbang dan secara khusus menguntungkan suatu kelompok, kesemuanya itu tidak dianggap kesalahan atau prasangka, namun disebut memang itulah praktik yang dijalankan sang wartawan.

Konstruksi reporter atas pengalaman interpretatif secara strategis membentuk laporan semacam itu. Dalam pendekatan konstruktivis, praktik menghasilkan laporan informasi yang mendukung satu sudut pandang, menempatkan pandangan sendiri dalam pendekatan positivistik yang lebih penting daripada pandangan kelompok lain dianggap sebagai praktik jurnalistik. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa praktik jurnalisme bias ini bukan untuk menelaah asal usul bias, tetapi untuk memandu bagaimana peristiwa itu distrukturkan.

Kelima, reporter bukanlah reporter, mereka adalah agen konstruksi pengalaman. Dalam pandangan positivis, berita dianggap sebagai cerminan dari asal mula pengalaman. Pandangan positivis memperlakukan reporter sebagai reporter (pengamat). Sebagai reporter, reporter hanya bertanggung jawab untuk melaporkan atau menyampaikan apa yang dilihatnya di tempat. Oleh karena itu, reporter harus berperan sebagai pemulung netral dan merekam berita langsung apa adanya. Fakta-fakta yang tercermin dalam berita berarti realitas itu objektif, karena realitas memang mencerminkan peristiwa yang sebenarnya. Laporan pengalaman dan laporan reporter sama dengan situasi sebenarnya.

Menjadi seorang pelapor, seluruh perkiraan pengamat yang baik dikenakan di wartawan: ia wajib mengambil jarak dengan obyek yang diliput. Jeda menggunakan obyek ini akan membantu wartawan mendapatkan warta tersebut apa adanya. Jarak dengan obyek yang hendak dia liput tersebut juga akan membatasi kemungkinan subjektivitas personal yang bermain waktu meliput suatu peristiwa.

Pada pandangan kaum positivis, menggunakan cara ini objektivitas pemberitaan akan diperoleh. Sebaliknya, kaum konstruksionis menganggap wartawan ibarat agen/aktor pembentuk empiris. Wartawan bukanlah pemulung yang mengambil keterangan begitu saja. Karena dalam kenyataannya, tidak terdapat empiris yang bersifat eksternal dan objektif, berada pada luar diri wartawan. Empiris bukanlah sesuatu yang “berada pada luar” obyektif, yang sah, seakan-akan ada sebelum diliput oleh wartawan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk serta diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Empiris itu kebalikannya, bersifat subjektif, yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif asal wartawan.

Keenam, etika jurnalis, pilihan moral, dan prasangka partisan merupakan bagian integral dari gosip. Sebagai jurnalis, positivisme menekankan pada penghapusan nilai, moral, dan keberpihakan jurnalis dalam proses produksi informasi. Dengan kata lain, pertimbangan moral dan etika selalu dapat diubah menjadi bentuk pilih kasih dalam banyak hal. Pada dasarnya para empiris harus diposisikan pada kegunaannya sebagai empiris de facto, dan tidak boleh terkontaminasi oleh pertimbangan subjektif. Wartawan di sini hanya berperan sebagai wartawan.

Sebagai seorang reporter, ia hanya memenuhi tugas menyampaikan fakta dan tidak membiarkan pertimbangan etika atau nilai eksklusif. Pertimbangan ini akan menjauhkan reporter dari pengalaman nyata. Gosip hanya ditulis untuk mengungkap fungsi penafsiran (interpretasi) berita atau

pengalaman. Pendekatan konstruktivis sebenarnya tidak berpikir demikian. Aspek etika, moralitas, dan nilai eksklusif tidak bisa dilepaskan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang melaporkan apa yang mereka lihat dan dengar.

Etika dan moralitas dalam banyak hal berarti kesesuaian dengan kelompok atau nilai tertentu, biasanya didasarkan pada keyakinan eksklusif, yang merupakan bagian integral dari pembentukan dan konstruksi pengalaman. Wartawan di sini lebih dari sekadar wartawan, karena disadari atau tidak, ia telah menjadi peserta dalam keragaman dan subjektivitas interpretasi publik. Karena manfaat tersebut, wartawan menulis isu bukan hanya sebagai penjelas, tetapi mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri menggunakan empiris yang diamati.

## **Agenda Setting Media**

Rencana pengaturan menggambarkan pengaruh kuat media pada kemampuan untuk memberi tahu kita informasi apa yang penting. Bernard Cohen (1963) menunjukkan bahwa "media mungkin tidak selalu berhasil dalam menentukan ide-ide orang, tetapi secara mengejutkan berhasil dalam memilih ide-ide pembaca."

Kajian wacana rencana setting artinya satu kajian yang tidak terlepas berasal kepentingan ekonomi politik media, adanya vested interest ini terutama dimainkan sang gatekeeper. Karena pada dasarnya, kebanyakan ahli menyatakan bahwa media memiliki potensi buat menstrukturkan banyak sekali berita bagi publik. Walter Lippman (1922) menyatakan bahwa publik bukan merespon peristiwa dalam lingkungannya, tetapi the picture in our heads. Kemudian Donald Shaw dan Max Mccombs memberikan pelukisan perihal fungsi agenda setting. Yaitu, editor dan broadcaster memainkan kiprah penting pada membuat realitas sosial, mirip mereka menjalankan tugas sehari-harinya, yaitu menampilkan isu.

Rogers serta dearing dalam rencana setting research menyatakan bahwa fungsi agenda setting terdiri berasal tiga bagian proses linier. Pertama, proses berita yang dibicarakan media, atau media rencana. Kedua rencana media menghipnotis atau berinteraksi apa yang publik pikirkan atau public agenda. Ini secara kentara menampilkan media mempunyai powerful effect atas rencana publik.

Pada 1970-an ketika rencana setting diperkenalkan sang mccombs serta shaw menjadi efek media yang berkenaan

dengan persepsi selektif, banyak memunculkan lapangan riset komunikasi tentang motivasi anggota khalayak terhadap keragaman pesan media. McCombs dan Shaw (1972) mengatakan, audience tidak hanya tahu masalah-dilema awam (yang menjadi topik) dari penekanan yang diberikan media massa terhadap topik itu. Meski studi rencana setting McCombs dan Shaw awalnya merupakan penegasan ulang efek media yang berpengaruh, ia bukanlah penegasan yang universal. Setahun sehabis studi awal McCombs dan Shaw, mulai menguji apakah ada disparitas motif untuk mencari berita membuat perbedaan dampak rencana setting.

Teori agenda setting sendiri diilhami oleh Walter Lippman (1922) yang dalam bukunya *Public Opinion* mengemukakan bahwa rakyat tak mungkin melakukan deal menggunakan lingkungan mereka sebagaimana mereka merespon suatu gambar (picture) pada kepala mereka.

Penelitian tentang agenda setting yang dilakukan oleh McCombs serta Shaw lebih menitikberatkan pada level individu atau psikologi menggunakan mengidentifikasi sejumlah contingent conditions yang menghipnotis agenda setting, yakni kebutuhan individual buat melakukan orientasi, frekuensi diskusi antar langsung, tingkat terpaan media, dan yang akan terjadi keputusan voting negara (diputuskan versus tidak diputuskan).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palmgreen serta Clarke mengenai agenda setting mengungkapkan dukungan parsial terhadap hipotesis bahwa surat liputan menampilkan rencana setting lebih kuat ketimbang televisi.

Penelitian ini juga membuktikan adanya perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

- ☞ Penelitian McCombs dan Shaw mengungkapkan tidak adanya perbedaan antara efek agenda setting dari surat kabar dan televisi.
- ☞ Penelitian Titon, Haney dan Baseheart menemukan adanya peran agenda setting dari surat kabar tetapi tidak untuk televisi.

Penelitian yang dilakukan oleh para bowers mencoba membandingkan agenda topik yang disajikan di surat kabar lokal menggunakan program publisitas dalam kandidat presiden. Dia tidak menemukan hubungan yang signifikan. Tetapi ada korelasi rendah antara rencana periklanan yang direncanakan presiden dan rencana gosip televisi. Inovasi ini mengatakan bahwa, asal mula sudut pandang metodologis, gambar kesimpulan pada agenda konfigurasi televisi, hanya tergantung pada berita, tidak dapat dievaluasi atau diukur karena televisi dan iklan gosip, memiliki dampak yang tidak selaras, terkadang saling merdeka.

Selain periklanan politik, televisi menyediakan berita dan acara khusus, berita pendek kompendium, program yang ditujukan untuk informasi gosip terbaru, yang biasa, berbicara dan bahkan komedi situasional. Di sisi lain, rencana grafik informasi umumnya ditentukan sesuai dengan analisis konten yang lebih luas, yang kadang-kadang termasuk penerbit, surat di editor, kartun, dll. Ulasan ini didukung oleh penemuan

bowers, yang menetapkan bahwa paparan televisi kepada publik terkait dengan periklanan di televisi dan mungkin sebagian besar disebabkan oleh insidental.

Dalam konteks perihal pertelevisian di Indonesia hal ini dapat ditinjau, bagaimana secara spesifik suatu program sinetron atau kuis yang mendramatisir kehidupan kemanusiaan begitu menerima sambutan antusias asal pasar pengiklan Bila dibandingkan dengan program yang memberikan pendidikan. Atau, betapa sulitnya suatu kajian sinetron yang tidak termakan buat mendramatisir kehidupan buat menerima “kue iklan”.

Beda halnya dengan media cetak umumnya pasar pengiklan tidak mempertimbangkan menggunakan ketatnya hidangan beritanya, namun cukup dengan pertimbangan apolog serta segmen pembacanya yang disesuaikan menggunakan sasaran pasar iklan yang akan dipasang. Agensi yang akan memasang iklan obat bertenaga atau obat nyamuk bakar tentu akan memilih memasang iklanya di media cetak mirip pos kota serta rakyat merdeka dibanding harian Kompas atau Media Indonesia. Bukan soal pertimbangan kualitas isi berita media bersangkutan, tetapi hanya dilema persentuhan antara koran serta pembacanya. Pembaca Kompas serta media Indonesia mereka yang berpendidikan tinggi serta berada dalam taraf ekonomi yang cukup diasumsikan asal kalangan menengah ke atas, yang ketika tidur tidak butuh obat nyamuk bakar sehingga tidak sinkron Jika iklan obat nyamuk bakar dipasang di harian Kompas.



Penelitian tentang agenda setting lebih banyak terpusat di dilema yang berkaitan dengan atribut khalayak. Tetapi sangat sedikit yang meneliti korelasi antara rencana setting dan atribut stimulus. Zucker (1978) mencoba melakukan kajian buat melihat hubungan antara rencana setting serta atribut stimulus menggunakan membandingkan data gallup poll nasional dengan isi informasi TV buat menentukan apakah penonjolan di gosip-gosip publik, berita-informasi bebas serta terminologi atau durasi penayangan dalam media adalah bagian penting dalam taraf efek pada program rencana pemirsa. Zucker menemukan suatu efek hanyalah buat membandingkan info yang tidak ditonjolkan dan hal itu hanyalah reaksi cepat mereka buat mengemukakan rencana TV. Lamanya penayangan jua terlihat penting, dengan info-berita yang dimunculkan dan melenyapkan rencana publik atau media sepanjang waktu. Dan hal ini berkaitan juga dengan kedekatan geografis publik.

Winter serta Eyal (1981) sudah meletakkan tonggak sejarah di informasi hak-hak sipil antara tahun 1954 dan 1976 menggunakan 27 kawasan perhitungan bunyi (polls) metode gallup. Dalam analisisnya mengatakan bahwa agenda media sesuai gabungan antara televisi, koran dan majalah, dengan rencana publik pada 13 polls gallup. Semuanya kecuali satu korelasi positif (berita moralitas), meskipun pola perubahan bisa dimaklumi di kekuatan hubungan yang tampak. Hal ini berarti bahwa ada faktor di luar cakupan media yang menghipnotis persepsi publik serta menekankan bahwa pikiran

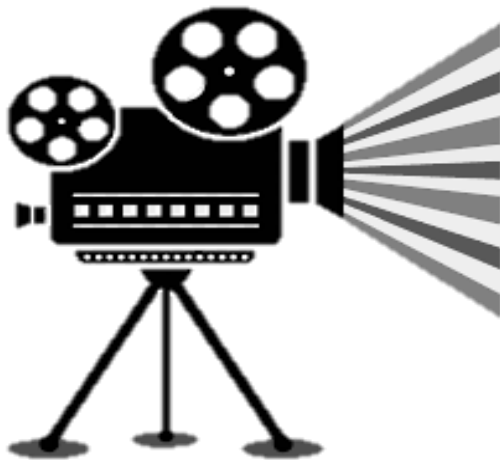
publik bukanlah “batu tulis kosong” yang menunggu ditulis sang media massa.

Oscar Gandy pada protes dan mccomb (1991) melihat perkembangan teori agenda setting dari perpektif psikologi sosial yang poly dijadikan dasar penelitian realitas komunikasi massa selama ini. Pada upayanya buat melihat perpektif ekonomi politik tersebut, Gandy memberi perhatian khususnya di asal isu. Melalui pendekatan ekonomi politik, Gandy melihat pengaruh pengetahuan serta isu memiliki nilai politis serta irit melalui rekanan mereka dengan kekuasaan atau untuk mengontrl tindakan yang lain.

Sedangkan gene burd dalam artikel yang sama memberikan beberapa tanggapan terhadap penelitian rencana setting selama 2 dasa warsa ini. Menurut burd, terdapat beberapa catatan penting buat penelitian agenda setting selama ini, yaitu:

1. Empiris dan hati-hati dan selektif dan terbuka untuk beberapa metode dan disiplin ilmu lainnya berbeda.
2. Ini terlalu terkonsentrasi di media.
3. Terlalu banyak pangkalan pada model model pertemuan produksi dan membentuk opini publik.
4. Lengkapi media sebagai mesin untuk pendidikan raksasa yang efektif untuk mensosialisasikan publik untuk menerima kebijakan yang dibuat oleh jurnalis.
5. Ambil publik sebagai atomistik (homogen, masyarakat massal).
6. Komunikasi dianggap sebagai transmisi isi objek yang muncul dari sumber ke penerima.

7. Memiliki asumsi ilegal tentang masyarakat umum bahwa ia menganggap bahwa ia memiliki kepentingan publik yang umum atau agenda yang dapat dilaksanakan.
8. Di masa depan, konfigurasi Angaeen dapat mencapai metodologi yang akan memungkinkan studi komunikasi di dunia.



*"Yang cerdas mengenai sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah pemisahan kekuasaan. Tidak hanya badan executive, legislatif, Yudisial, tapi juga kebebasan militer dari masyarakat sipil, kebebasan media dan pers, Bank Pusat yang merdeka dan bebas"*

*- Feisal Abdul Rauf-*



*“Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah”*

*- Soe Hok Gie-*

Dalam konteks Indonesia, pemilihan umum secara berkala telah diselenggarakan sejak awal kemerdekaan negara, namun karena sistem politik yang otokratis, demokratisasi pemilu sebelumnya gagal membentuk nilai-nilai demokrasi yang matang. Pada pemilihan umum 2004, pemilihan umum yang seluruhnya terdiri dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan tanpa kekerasan dan kekacauan. Harapan untuk menentukan bentuk demokrasi yang ideal mulai muncul dan menjadi pencapaian bersejarah bagi negara ini.

Berbagai tahapan demokrasi Indonesia kembali diuji, dan sejak 2005, momentum pemilihan kepala daerah secara langsung terus berlangsung. Idealnya, momentum pemilu digunakan untuk memperkuat proses demokratisasi. Dalam rangka penguatan demokratisasi, orang yang sadar demokrasi merupakan langkah awal menuju jalan yang benar menuju

demokrasi. Pembentukan negara negara yang memiliki keberlanjutan demokratis dan demokrasi Kedaban lebih cenderung dilakukan secara efektif melalui pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan sipil. Pembaruan asli pendidikan sipil sebenarnya berada di tingkat partisipasi politik masyarakat dalam dorongan politik apa pun, seperti pemilihan. Seberapa jauh pemilihan regional akan datang dari ruang untuk partisipasi politik bagi penghuni? Apakah pilkada mampu menjadi titik persaingan bagi orang-orang dan negara dalam manifestasi partisipasi politik dalam Warga?

Partisipasi politik orang tentu bukan tanggal kondisi LAICA atau sistem politik yang diprosesnya. Sistem politik bangsa Indonesia sampai saat ini telah berubah berkali-kali, dari tatanan baru ke reformasi. Dia menyadari bahwa reformasi sering ditafsirkan sebagai era yang lebih demokratis.

Dengan penggunaan konstelasi politik di era reformasi, penguatan demokrasi hukum menjadi akar penyebab berakhirnya transformasi demokrasi, yang semakin dirasakan langsung oleh publik melalui pemilu sejak 2004 dan pemilukada 2005. Sebagai akibat logis dari perubahan suasana politik, dinamika dan intensitas ekspresi politik menjadi semakin nyata dalam bidang kehidupan sosial dan politik. Setidaknya warga terpapar isu politik dan berpartisipasi tidak hanya setiap lima tahun sekali selama pemilihan umum. Apalagi, Pilkada aktif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai proses transformasi politik, arti penting Pilkada selain menjadi bagian dari tatanan struktur kekuatan makro agar lebih menuntut berjalannya checks and balances antara

lembaga politik pusat dan daerah di semua tingkatan. diselenggarakan secara bertanggung jawab. , Berkualitas tinggi, efisien, legal, dan peka terhadap kepentingan sosial.

Pemilihan umum (Pemilu) dalah lembaga dan prosedur untuk praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan orang-orang yang membiarkan pembentukan pemerintahan yang representatif. Pemilihan adalah proses penentuan orang untuk menduduki posisi politik, mulai oleh Presiden / Wakil Presiden, Wakil Gubernur / Gubernur dan Bupati, kepada perwakilan warga di berbagai tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten / kota). Pemilihan di negara demokratis berarti hal mendasar. Melalui pemilu, orang dapat memilih orang untuk menempati posisi Publik di pemerintah. Dengan kata lain, melalui pemilihan komunitas yang berpartisipasi dalam proses politik keduanya secara eksklusif secara tidak langsung. Pemilihan adalah prosedur hukum / cara untuk menyalurkan aspirasi / kehendak penduduk dalam penentuan masa depan bangsa.

Prasyarat untuk keberhasilan pemilihan umum adalah partisipasi politik warga. Oleh karena itu, mendukung partisipasi politik masyarakat pemilihan, orang harus mendapatkan informasi tentang program dan tahap pemilihan. Ini sangat diharapkan, karena orang ingin mengatakan pemegang

*Partisipasi politik masyarakat merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat*

kedaulatan nyata di negara ini. Tingginya Parispearance of the Community dalam program pemilihan yang telah dipahami oleh

masyarakat dan kewajiban mereka untuk menjadi pemegang kedaulatan negara.

Partisipasi politik masyarakat adalah instruksi tentang pelaksanaan kekuatan politik yang sah oleh rakyat. Anggota peserta yang berpartisipasi politik, misalnya, melalui pemilihan dalam pemilihan harus didorong oleh keyakinan bahwa melalui pemilihan kepentingan mereka dapat disalurkan atau setidaknya, perhatikan dan sedikit hal itu dapat memengaruhi tindakan pemerintah untuk membuat pengikatan keputusan.

Gatara (2012: 207) mendefinisikan partisipasi politik seperti: "Aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses perayaan pemilihan, mirip dengan partisipasi dalam kampanye politik, memilih dan bekerja dalam pilihan". Untuk mencapai partisipasi maksimum, penyebaran masalah (Pendahuluan) dari wacana permintaan pemilihan pemilih (orang).

Implementasi demokrasi Indonesia pada saat ini berjalan menuju demokrasi dewasa, di mana orang menjadi pemilik kekuatan tertinggi tampaknya jelas. Partisipasi orang dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin terlihat di Indonesia.

Partisipasi politik warga merupakan salah satu bentuk demokratisasi. Dalam proses pembangunan politik di negara berkembang seperti Indonesia, keinginan tersebut menjadi sangat penting bagi warga negara, karena di dalamnya dapat terwujud hak dan kewajiban warga negara. Sistem ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses ini. Panitia Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun



2008 menjelaskan tentang pedoman penerapan pengenalan dan penyampaian informasi pemilihan umum bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Di daerah distrik, tugas dan otoritas sosialisasi tahapan dan kegiatan pemilihan berarti tanggung jawab Komisi Pemilihan KPU (KPU). Ini dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008, Prosedur Kerja untuk PPK, PPS dan KPPS Pasal (4) tugas dan otoritas PPK adalah: (1) mengimplementasikan pengantar pemilihan dalam masyarakat.

Namun, pentingnya pemilihan tidak sepenuhnya dilakukan oleh semua warga negara Indonesia, terutama orang-orang seperti di daerah.

Hal ini terlihat dari indikator :

1. Masih banyak orang yang tidak hadir di stasiun pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara;
2. Komunitas cenderung lebih suka bekerja untuk menyediakan keluarga alih-alih mengikuti kegiatan kampanye;
3. Penduduk komunitas menunjukkan masa bodoh dan tidak peduli dengan operasi pemilihan.

Penulis mencurigai bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat di beberapa daerah dalam pemilihan lokal setelah 2017 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Komite Umum Pemilihan (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten.

Ini dapat dilihat dari indikator:

- 1) Banyak orang tidak mengerti tujuan pemilihan;
- 2) Kurangnya informasi tentang kegiatan / implementasi pemilihan yang diperoleh masyarakat;
- 3) Banyak orang yang tidak memahami prosedur untuk memilih (antara pendaftaran suara).

Kurangnya pemahaman masyarakat tujuan dan fungsi pemilihan diyakini sebagai penyebab partisipasi politik yang rendah di masyarakat.

# **KINERJA PENYELENGGARA PEMILUKADA**

Panggung demokrasi Indonesia kembali diuji, dan sejak 2005 telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Idealnya, momentum Pilkada digunakan untuk memperkuat proses demokratisasi. Dalam rangka penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki rasa demokrasi merupakan langkah awal menuju jalan yang benar menuju demokrasi. Hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education) atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) dimungkinkan untuk membentuk peradaban yang demokratis dan masyarakat nasional yang beradab dan demokratis.

Terwujudnya pendidikan kewarganegaraan sebenarnya tergantung pada derajat partisipasi politik warga negara dalam berbagai tren politik seperti pemilu. Sejauh mana pemilihan kepala daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik? Bisakah Pilkada menjadi titik kontak antara masyarakat dan negara, sebagai wujud partisipasi politik publik?

artisipasi politik rakyat tentunya tidak terlepas dari keadaan umum atau sistem politik yang sedang dibentuk. Selama ini sistem politik bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan, dari asal mula orde baru hingga reformasi. Masyarakat menyadari bahwa reformasi seringkali dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Dengan struktur politik era reformasi dan keterbukaan, penguatan legitimasi demokrasi menjadi harapan mengakhiri transisi demokrasi. Melalui pemilu sejak 2004 dan pemilu langsung 2005, masyarakat bisa semakin merasakannya. Sebagai akibat logis dari perubahan suasana politik, dinamika dan intensitas ekspresi politik semakin nyata dalam bidang kehidupan sosial dan politik. Setidaknya masyarakat akan terpapar peristiwa, dan partisipasi politik tidak hanya setiap 5 tahun sekali selama pemilihan umum. Namun, pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menghidupkannya.

Sebagai proses asal transformasi politik, makna pemilihan selain makna pangsa struktur kekuatan makro sehingga lebih baik untuk menjamin operasi kontrol dan mekanisme politik yang berasal dari forum-forum politik Tingkat pusat di tingkat regional, orang-orang mengharapkan pilihan untuk dibentuk untuk dipertanggungjawabkan, berkualitas, kawasan berkualitas yang sah dan peka terhadap kepentingan penduduk.

Hak pilih universal (Pemilu) merupakan forum dan tata cara praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan warga negara dan dapat membentuk pemerintahan yang representatif. Pemilu adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik, mulai dari presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, dan bupati/walikota hingga wakil rakyat di semua tingkat pemerintahan (provinsi, bupati/kota). Pemilu di negara demokrasi sangat penting. Melalui pemilihan umum, orang dapat memilih orang untuk memegang jabatan

publik di pemerintahan. Dengan kata lain, melalui pemilu, warga negara berpartisipasi secara penuh atau tidak dalam proses politik. Pemilu merupakan mekanisme/metode hukum yang memandu warga negara untuk memilih keinginan/kehendak negara di masa depan.

Prasyarat untuk suksesnya pemilihan umum adalah partisipasi politik warga negara. Oleh karena itu, dengan mendukung partisipasi politik komunitas dalam pemilihan, masyarakat harus mendapatkan informasi tentang program dan tahap pemilihan. Ini sangat diperlukan, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang sebenarnya di negara ini. Paraaturisasi yang tinggi dari masyarakat dalam pemilihan menetapkan bahwa penduduk sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka adalah pemegang kedaulatan negara.

Pada tahun 2019 penulis melaksanakan penelitian terhadap pelaksanaan pemilihan ketua wilayah 2017, pada penelitian ini penulis hendak memotret pelaksanaan dilihat berasal aspek kinerja penyelenggara, partisipasi warga.

### **Sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Kabuapten (KPU)**

Sosialisasi Menurut Peraturan KPU No. 23, 2008 Berkenaan dengan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyajian Informasi tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dan DPRD adalah "Proses pengiriman informasi tentang tahapan dan program-program rumah perwakilan, DPR dan "pemilihan umum" DPPRD. Merupakan salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan.

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi  
Pemilukada antara lain :

- Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya, pertemuan kerja, konferensi dan simulasi.
- Komunikasi melalui media massa, itu dapat dilakukan dengan pengiriman informasi dalam media cetak dan elektronik melalui tulisan, gambar, suara dan audiovisual.
- Mobilisasi sosial, itu dapat dilakukan melalui undangan partisipasi semua komponen masyarakat, baik organisasi masyarakat, agama, organisasi adat, LSM, lembaga pemerintah dan partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam realisasi tahapan dari pos. Pilihan Konflik Lokal, seperti deklarasi pemilihan pasca konflik lokal, deklarasi musiman yang damai, sebuah gerakan terhadap abstain, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini, 20015, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam, 1996, *Demokrasi di Indonesia*, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Conway, M. Margaret, 1985, *Political Participation in the United States*, Washington DC : Congressional Quarterly, Inc.
- Conway, M. Margaret, 1992, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta Obor Indonesia.
- Conway, M. Margaret, 2004, *Perihal Demokrasi*, Jakarta Obor Indonesia.
- Eriyanto, 2007, *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LKIS.
- Firmansyah, 2007, *Marketig Politik : antara pemahaman dan realitas*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara: terjemahan Sahat Simamora*, Jakarta: Bina Aksara, Co.
- Gaffar, Affan, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Giddens, Anthony, 1984, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, University of California.
- Huntington P, Samuel, Nelson. Joan, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lasswell, Harold, 1958, *Politics : Who Gets What, When, How*, New York : Meridian Books.
- Lipsent, Seymour Martin, 2007, *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas"oed, Mohtar dan MacAndrew, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michels, Robert, 1968, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendemcy of Modern Democracy*, London: Free Press.
- Pradhanawati, Ari, 2005, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta : KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Priyatmoko, Dewi, 2009, *Mandiri Belajar SPSS; Untuk analisis Data dan Uji Statistik*, Yogyakarta : Mediakom.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said, Gatara, AA dan Dzulkiah, Said, Moh. 2007, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.



## TENTANG PENULIS



Diryo Suparto, S.Sos, M.Si adalah dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Panca Sakti (FISIP – UPS) Tegal. Strata Satu di selesaikan di Departemen Ilmu Komunikasi UNDIP, Gelar Master juga diperoleh dialamaternya dengan beasiswa

unggulan dari Kemenristek Dikti. Pria kelahiran tegal ini sejak mahasiswa aktif di organisasi dari mulai Jaringan Pers Mahsisa, Presma UNDIP

Dosen muda yang sangat kosen denagan komunikasi politik dan isu sosial kritis sering di minta awak media pendapat dan analisanya mengenai isu nasional maupun dinamika lokal. Pria berkacamata minus ini hangat dan familier dengan mahasiswa karenanya di dault menjadi Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, dan oleh pihak Yayasan Panca Sakti juga di beri mandat sebagai Dewan Pengembangan Yayasan.

Alumni LEMHANAS RI 2018 ini juga sering memberikan ceramah atau training di kalangan Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Tema yang biasa diangkat adalah tentang Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Radikalisme Dan Manajemen Dan Resolusi Konflik. Baginya organisasi dan politik adalah Hobby makanya diluar tugas rutin utamanya sebagai dosen juga aktif dan menjadi founder lembaga survey

dan konsultan politik PSPK (Pusat Studi Politik Dan Kebijakan Publik), sudah banyak membidani lahir dan suksesnya politisi dalam kemenangan pemilu kada. Baginya dunia konsultan politik adalah sesuatu yang asik karena bukan hanya dinamis dan kreatif tapi juga cerdas membaca celah kemenangan dan kelemahan lawan.

Buku ini merupakan bagian dari manifestasi pemikiran dan pengalamannya yang selalu membuat gelisah. Ada kalimat yang sering terlontar adalah akademisi tidak boleh di menara gading yang penuh keangkuhan susah untuk di sentuh oleh masyarakat.